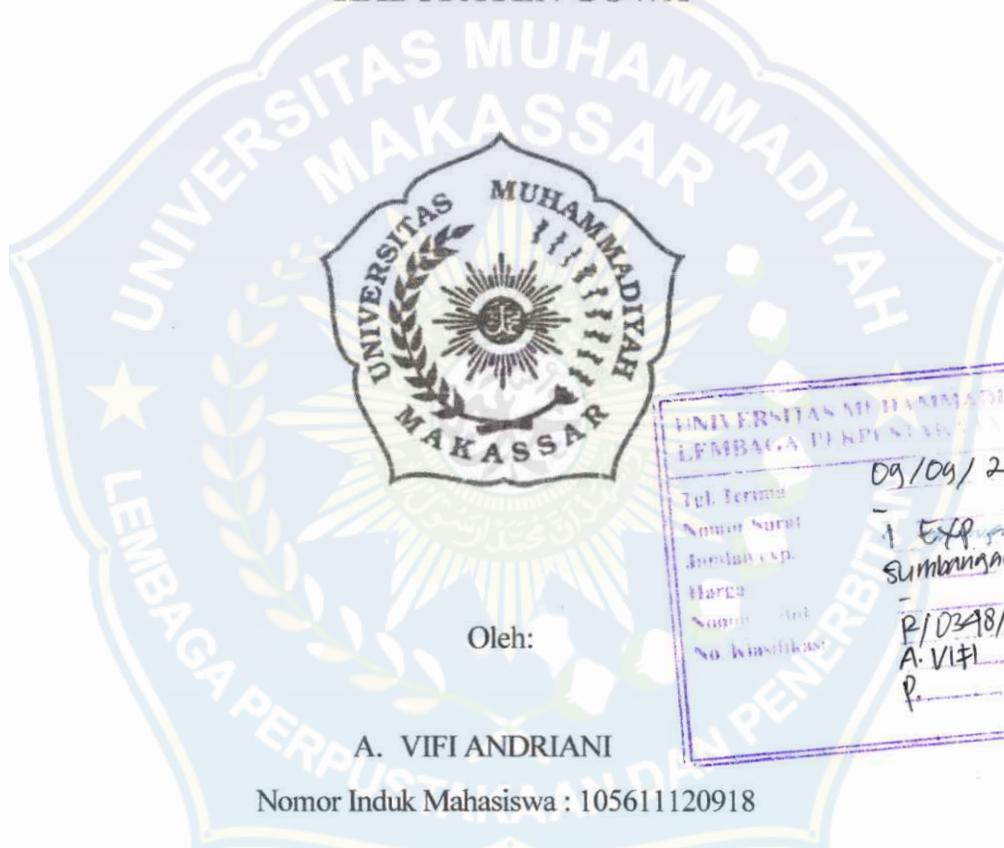


MILIK PERPUSTAKAAN  
UNISMUH MAKASSAR

## SKRIPSI

### PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GUNA MENGATASI PERMASALAHAN SAMPAH DI KELURAHAN TAMARUNANG

KABUPATEN GOWA



Oleh:

A. VIFI ANDRIANI

Nomor Induk Mahasiswa : 105611120918

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
LEMBAGA PERPUSTAKAAN & PENGERITIAN

Tgl. Terima: 09/09/2022  
Nomor Surat:  
Jumlah exp.:  
Harga:  
Nomor Akta:  
No. Kiaslikew:  
1 Expp. Sumbangan Alumni  
P/03481/DPN/2200  
A. VIFI  
P.

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

**SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT GUNA MENGATASI PERMASALAHAN  
SAMPAH DI KELURAHAN TAMARUNANG  
KABUPATEN GOWA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh  
Gelar Sarjana Administrasi Publik (S. AP)

Disusun Oleh:

A. VIFI ANDRIANI

Nomor Induk Mahasiswa: 105611120918

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan  
Masyarakat Guna Mengatasi Permasalahan  
Sampah Di Kelurahan Tamarunang  
Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : A. Vifi Andriani

Nomor Induk Mahasiswa : 105611120918

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Pembimbing I

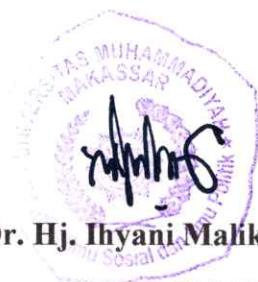
Dr. H. Lukman Hakim, M.Si

Pembimbing II

Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

Mengetahui :

Dekan



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

NBM : 730 727

Ketua Program Studi

Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

NBM : 991 742

## **HALAMAN PENERIMAAN TIM**

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 073/FSP/A.4-II/VIII/44/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu 27 Agustus Tahun 2022.

### **TIM PENILAI**

Ketua

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM : 730727

Sekretaris

Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM : 992797

### **TIM PENGUJI**

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si

( )

2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

( )

3. Syukri, S.Sos., M.Si

( )

4. Andriana, S.IP., M.AP

( )

## **HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : A. Vifi Andriani

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11209 18

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Juli 2022

Yang Menyatakan,



A. Vifi Andriani

## **ABSTRAK**

**A.Vifi Andriani, Lukman Hakim, Ansyari Mone. 2022. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Guna Mengatasi Permasalahan Sampah Di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat guna mengatasi permasalahan sampah di kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, teknik pengumpulan menggunakan observasi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dilihat dari tiga indikator yaitu : 1) Peran Pemerintah dalam sebagai Regulator di Kelurahan Tamarunang sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik karena Pemerintah Kelurahan Tamarunang khususnya telah melakukan pencanangan dalam hal sabtu bersih. 2) Peran Pemerintah sebagai Dinamisator di Kelurahan Tamarunang sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik dilihat dari peran Pemerintah dalam hal pemberian bimbingan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. 3) Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator di Kelurahan Tamarunang dapat dikatakan belum berjalan dengan baik walaupun Pemerintah telah menyediakan beberapa fasilitas atau sarana dan prasarana tetapi hal tersebut dinilai masih sangat kurang apalagi dalam hal ini Kelurahan Tamarunang merupakan salah satu Kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Somba Opu.

Kata Kunci : Peran,Pemberdayaan Masyarakat,Sampah

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya yang telah meridhoi segala jalan dan upaya penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini tepat pada waktu yang telah ditentukan. Shalawat serta salam juga peneliti sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang biadab menuju alam yang beradab, yang telah menggulung tikar-tikar kebodohan dan membentangkan tikar-tikar kebenaran.

Dalam melakukan penelitian skripsi ini tidak sedikit penulis menghadapi kesulitan serta hambatan baik teknis maupun non teknis. Namun atas izin Allah SWT, juga berkat usaha, doa, semangat, bantuan, bimbingan serta dukungan yang penulis terima baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “**Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Guna Mengatasi Permasalahan Sampah Di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa**” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Andi Mappiasse dan Ibunda Sumarni untuk beliau berdualah skripsi ini penulis persembahkan yang selalu membantu dan memberikan dukungan baik moral, spiritual, dan material serta doa kepada penulis hingga detik ini. Terima kasih atas segala kasih sayang yang telah diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga

penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya penulis akan dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Lukman Hakim, M.Si selaku Pembimbing I dan Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan segala ilmu yang dimiliki selama proses pembelajaran di kampus sehingga dapat menjadi pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis ke depan.
5. Bapak Lurah Kelurahan Tamarunang Bapak H. Mukhtar Ninra S.Sos. M.Adm.Kp atas bantuan yang di berikan berupa izin melaksanakan penelitian.
6. Ibu Sekertaris Lurah Kelurahan Tamarunang Ibu Wahyuni Wahab S.E atas

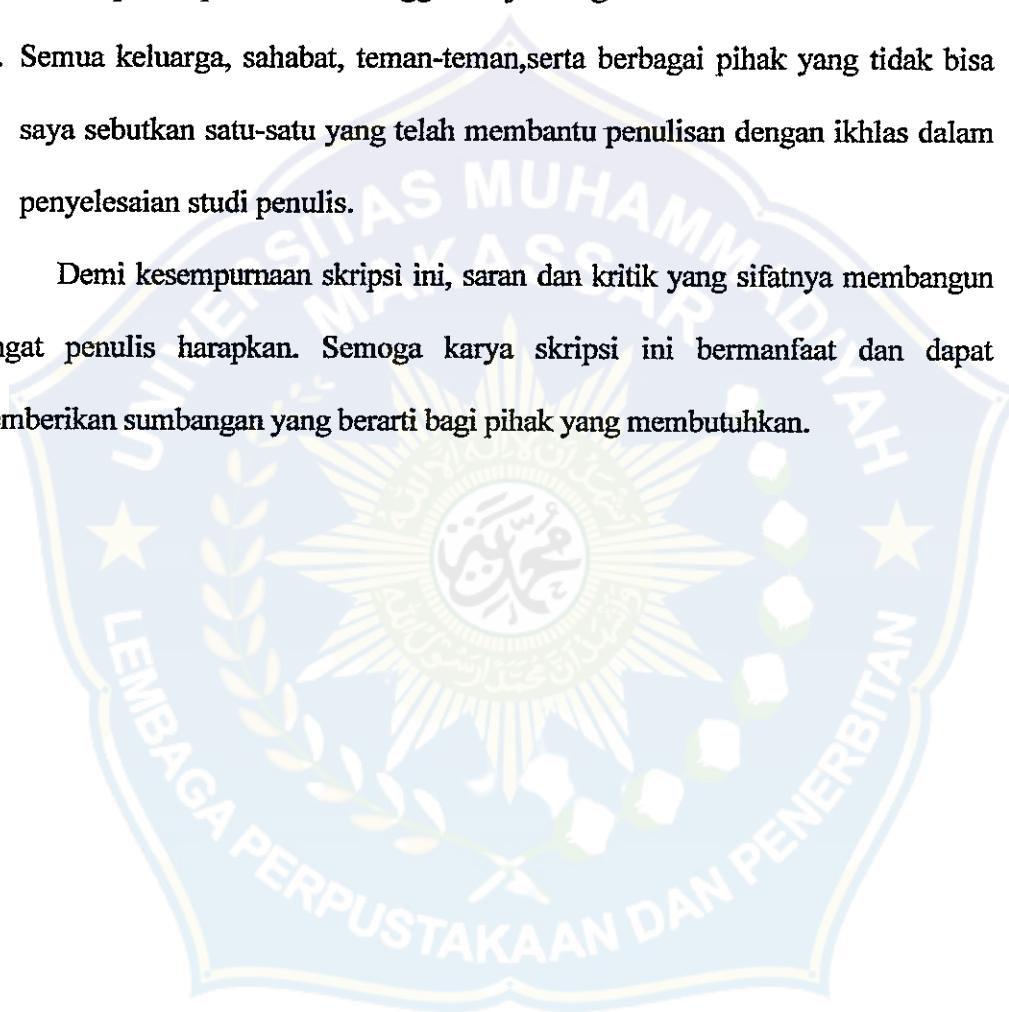
bantuan yang di berikan berupa informasi untuk penelitian.

7. Ibu Kasi Penpelmas Ibu Roslina, S.Sos atas bantuan yang di berikan berupa informasi untuk penelitian.
8. Bapak Ketua Rt 1 Kelurahan Tamarunang Suhardi atas bantuan yang di berikan berupa informasi untuk penelitian.
9. Ibu Suriati DG Kanang Pengurus Bank sampah Al Mutsyar Jl. Al Jibra Kelurahan Tamarunang atas bantuan yang di berikan berupa informasi untuk penelitian.
10. Seluruh Staf Kantor Kelurahan Tamarunang, Pengurus Karang Taruna, Aparat Kelurahan Tamarunang, serta Masyarakat Kelurahan Tamarunang atas segala bantuan selama peneliti melaksanakan penelitian.
11. Saudara dan Kakak Ipar penulis A. Ardiansya, Lilis Suryani yang selalu mendukung dan mendoakan penulis baik dari segi materil maupun non materi.
12. Seluruh Keluarga, Tante, Om, Sepupu, Ponakan, terima kasih atas dukungan, doa, dan bantuannya selama ini yang tak ada hentinya kepada penulis.
13. Sahabat-Sahabat dari bangku SMA (Bertujuh) Hasmianti, Naziah Mufidah, Suci Musfira, Nirdahayu, Hasnita, Tri Suci Ramadani yang selalu bersama penulis sampai saat ini menyusun skripsi serta memotivasi dengan tulus dan ikhlas semoga persahabatan kita sampai surganya Allah Aamiin.
14. Bestie since Maba Ade firma, Jumriana, Mei Wulandari, Nurfadillah yang selalu bersama dalam suka maupun duka 4 tahun belakangan ini semoga

kita semua sukses dan bisa bermanfaat nantinya aamiin.

15. Teman-teman ADN E 2018 yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama proses perkuliahan bangga menjadi bagian dari kalian semua.
16. Semua keluarga, sahabat, teman-teman, serta berbagai pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang telah membantu penulisan dengan ikhlas dalam penyelesaian studi penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.



## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN HASIL.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Teori dan Konsep .....	10
C. Kerangka Pikir .....	31
D. Fokus Penelitian.....	31
E. Deskripsi Fokus Peneliti .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Waktu dan Lokasi .....	35
B. Jenis dan tipe penelitian .....	35

C. Informan.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data.....	37
F. Teknik Pengabsahan Data.....	39
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	40
B. Hasil Penelitian .....	58
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	36
Tabel 4.1 Data Iklim Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia.....	44
Tabel 4.2 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Gowa .....	45
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kelurahan Tamarunang.....	55
Tabel 4.4 Penduduk Menurut Pendidikan Kelurahan Tamarunang .....	56
Tabel 4.5 Sarana Pendidikan Kelurahan Tamarunang .....	56
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama .....	57

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	32
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa .....	54



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dinyatakan defenisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah saat ini telah menjadi permasalahan bagi perkotaan karena cepatnya pertambahan jumlah penduduk terutama terkait dengan pengolahannya karena berhubungan langsung dengan lingkungan tempat manusia tinggal(Pemerintah 2008).

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, dijelaskan bahwa sampah merupakan permasalahan nasional sehingga pengolahannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Selain itu, ada hal lain yang penting untuk diperhatikan, bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dan pengolahan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberikan tanggung jawab untuk itu(Dobiki 2018).

Ketika jumlah penduduk Masih sedikit, sampah tidak menjadi masalah. Namun seiring meningkatnya jumlah dan aktivitas penduduk, perubahan gaya hidup serta pola komsumsi masyarakat, mengakibatkan timbunan sampah semakin banyak baik jumlah maupun variasinya, sehingga menimbulkan masalah

yang membahayakan bagi kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu akibat jumlah penduduk yang semakin banyak dan ketersediaan lahan yang semakin berkurang, pemerintah daerah semakin kesulitan mendapatkan lahan untuk pengolahan sampah, seperti : Tempat penampungan sampah (TPS),Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), dan Tempat pemrosesan akhir (TPA) Sampah(Muchsin and Saliro 2020).

Banyak sekali masalah masalah sosial yang selama ini masih menjadi bagian dalam tatanan kehidupan masyarakat, salah satunya adalah permasalahan sampah. Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa yang akan datang, maka diperlukan adanya lingkungan permukiman yang sehat. Dari aspek persampahan, kata sehat akan berarti sebagai kondisi yang akan dapat dicapai bila sampah dapat dikelola secara baik sehingga bersih dari lingkungan permukiman dimana manusia beraktifitas di dalamnya (Permen PU nomor: 21/PRT/M/2006)(Ferdiansyah and Arsiyah 2014).

Sampah saat ini telah menjadi permasalahan bagi perkotaan karena cepatnya pertambahan jumlah penduduk terutama terkait dengan pengolahannya karena berhubungan langsung dengan lingkungan tempat manusia tinggal(Qodriyatun 2014). Pertambahan jumlah penduduk ini tentu menambah pula masalah yang akan dihadapi khususnya mengenai sampah. Sampah menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup dan kenyamanan lingkungan. Secara mendasar salah satu tugas dan kewajiban pemerintah adalah untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

tahun 1945, dalam mensejahterakan rakyat pemerintah harus menjalankan peranannya baik sebagai fasilitator, dinamisator, regulator, motivator, dan kasalitator.

Regulasi dalam pengelolaan sampah kota yaitu menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan(Muhadam Labolo 2016).

Berdasarkan hasil observasi Kelurahan Tamarunang merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang menjadi salah satu pusat perdagangan yang cukup besar sehingga banyak memproduksi sampah di setiap tahunnya. Dilihat dari masalah sampah yang terjadi di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa sangat menganggu pemandangan dan mengurangi keindahan lokasi ini. Dimana di kelurahan Tamarunang itu sendiri sangat membutuhkan perhatian khusus dari kalangan pemerintah maupun masyarakat sekitar untuk menanggulangi masalah ini. Pemerintah kelurahan mengungkapkan bahwa salah satu masalah utama yang terdapat di Kelurahan Tamarunang yaitu masalah sampah. Belum adanya tempat pengangkutan sampah yang memadai dan dinilai masih kurang karena tidak dapat mengangkut sampah sehingga banyak sampah yang masih berserakan disekitar lingkungan masyarakat itu sendiri. Selain itu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk sedikit berpartisipasi mengatasi

masalah sampah tersebut. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang yang tidak berguna bukan sebagai sumber daya yang perlu dan dapat dimanfaatkan. Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan dimana dilihat bahwa pemerintah masih harus berperan lebih dalam memberdayakan masyarakatnya sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator dalam pemberdayaan yang disebabkan masyarakat masih kurang mempunyai acuan dasar untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan, belum maksimalnya peran pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat, serta masih minim yang menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan.

Berdasarkan data, dilapangan ada 55 bank sampah di Kabupaten Gowa yang tersebar di Kecamatan Somba Opu dan beberapa di antaranya yakni Bank Sampah Unit Al-Hijrah Kelurahan Paccinongan, Bank Sampah Unit Nurhidayah Kelurahan Tompobalang, Bank Sampah Unit Al Mutsyar Kelurahan Tamarunang, Bank Sampah Unit Nurul Nur Kelurahan Samata, Bank Sampah Unit Peduli Bersama Kelurahan Paccinongan, dan Bank Sampah Unit Seroja Kelurahan Pandang-pandang. Kecamatan Somba Opu bisa mengelola sampah 3-5 ton dalam 1 bulan begitupun dikelurahan Tamarunang Itu sendiri. Pengelolaan sampah telah menjadi persoalan klasik baik di tingkat lokal nasional bahkan telah menjadi isu global. Volume timbunan sampah yang meningkat karena jumlah populasi dan konsumen. Ini juga terjadi di kabupaten Gowa yang memiliki posisi strategis yang menarik, pertumbuhan industri dan kawasan pemukiman dan menyajikan

kabupaten Gowa sebagai salah satu kabupaten dengan penduduk terbesar di Sulsel, sehingga akan meningkatkan komsumsi masyarakat menggunakan kemasan sekali pakai dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Gowa telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan persampahan baik dari aspek pengurangan maupun penanganan sampah. Salah satu yang kita lakukan adalah kegiatan bank sampah, sosialisasi pemilahan, penggunaan tumbler, bersih-bersih lingkungan, penyediaan sarana pengangkutan sampah dan fasilitas TPS 3R walaupun demikian sudah tersedianya beberapa fasilitas yang disediakan itu belum cukup memadai dan nyatanya beberapa masyarakat khususnya di kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa masih sampahnya masih perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengangkat judul “**Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Guna Mengatasi Permasalahan Sampah Di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

**Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Guna Mengatasi Permasalahan Sampah di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa?**

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini, adalah:

Untuk mengetahui Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Guna Mengatasi Permasalahan Sampah di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa?

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat penelitian ini, adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain dalam kajian tentang Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat guna Mengatasi Permasalahan Sampah dan untuk menambah Khazanah kepustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar khusunya bagi jurusan Ilmu Administrasi Negara dalam hal Peran Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat guna mengatasi permasalahan sampah.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan evaluasi bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Serta penelitian ini sebagai motivasi untuk mahasiswa ataupun masyarakat umum agar mengetahui Peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakatnya untuk mengatasi permasalahan sampah.

### 3. Manfaat Akademik

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

Nama	Judul Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Husnawati,S (2016)	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah Di Kota Makassar.	Peran Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat: (1)Regulator (2)Dinamisator (3)Fasilitator.  Dan adapun faktor pendukung peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat: (1)Asperasi pemerintah daerah (2)Dukungan masyarakat luar daerah.  Dan faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat (1)Terbatasnya pemahaman

		<p>dan pengetahuan masyarakat .</p> <p>(2)Ketersediaan lahan yang kurang memadai.</p>
Ahmad Rivai (2019)	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Cangkir Hijau Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.	<p>Hasil penelitiannya didapat temuan sebagai berikut:</p> <p>Untuk membangkitkan kesadaran masyarakat tentu memerlukan Tahapan-tahapan yang panjang, Adapun tahapan yang dilakukan antara lain:</p> <p>Seleksi lokasi/wilayah, Sosialisasi pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pemandirian masyarakat.</p> <p>Hasil pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah dapat dilihat dari segi kebersihan, Lingkungan masyarakat menjadi lebih bersih,</p>

		<p>tertata, serta membangkitkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah nya dan dari segi ekonomi, masyarakat mendapatkan keuntungan dari sampah yang mereka setorkan ke bank sampah cangkir hijau, walaupun nilai nya tidak terlalu besar dan masyarakat pun bisa memilih untuk menabung nya, ditukarkan langsung, atau digunakan untuk beberapa program yang digulirkan Bank sampah Cangkir Hijau(Ahmad 2019).</p>
Miftahul Khairi (2021)	Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Daur Ulang Sampah (Studi Pada Komunitas Bank Sampah Bangkitku Pall	Dimana penelitiannya membahas tentang kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui

	<p>Lima Kecamatan Kota Baru Kota Jambi).</p>	<p>kegiatan daur ulang sampah. Hasil penelitiannya mengatakan bahwasanya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam mengupayakan pengurangan sampah yang ada sudah berjalan, sebagaimana pemerintah sudah mengupayakan dengan adanya kegiatan pendauran ulang sampah yang ada di Bank Sampah Bangkitku (BSB) yang mana terdapat masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan(Miftahul 2021).</p>
--	--	---

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan alasan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan dan menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari penelitian ini. Yang berlokasi di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa karena penelitian ini ingin melihat bagaimana Peran Pemerintah

Dalam Pemberdayaan Masyarakat Guna Mengatasi Permasalahan Sampah Di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa.

## B. Teori dan Konsep

Dalam melakukan penelitian ada baiknya diketahui dasar-dasar topik pembahasan yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pemahaman tentang hal yang akan di teliti.

### 1. Konsep Peran

#### a. Definisi Peran

Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut Terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat (Ii and Peran 2015).

Peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang individu harus lakukan dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran peran tersebut. Peran juga dapat diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem.

Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Dari beberapa pendapat di atas, dapat dirumuskan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan kepada seseorang sesuai dengan kedudukannya baik secara formal maupun informal di dalam suatu sistem (Ferdiansyah and Arsiyah 2014).

Menurut Merton (2007) Peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang yang menduduki status tertentu, hal ini juga berkaitan dengan hubungan berdasarkan peran yang dimiliki seseorang yang menduduki status sosial tertentu.(Setiyawan 2013).

Menurut Soekanto (2012) menyebutkan arti peran yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan yang menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda.

- a. Jenis-Jenis Peran Mengacu pada penjelasan di atas, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Soekanto (2012), adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1). Peran Aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat diukur dan dilihat dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

## 2). Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

## 3). Peran Pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pendapatnya Soerjono Soekanto (2009) menjelaskan bahwa apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peran. Pembedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya.

Selanjutnya Soejono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
  2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
  3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat
    - a. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual Pemberdayaan berasal dari kata “daya”, yang berarti kekuatan atau kemampuan, yang mana dalam bahasa Inggrisnya “power” selanjutnya dikatakan pemberdayaan atau *empowerment*, karena memiliki makna perencanaan proses dan upaya penguatan atau memampukan yang lemah.

Pemberdayaan tidak sekedar memberikan Kewenangan atau Kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu melepaskan diri dari kemiskinan.

Menurut Sulistiyan (2004). Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan dan kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya.

Sedangkan menurut Soetomo (2015) masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpolasi dan terorganisasi.

Menurut Rumusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (2008), pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan Kultural komunitas,

mengintegrasikan komunitas kedalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional.

Dengan demikian mengacu pada pengertian dari teori ahli diatas dalam penelitian ini pemberdayaan dapat diartikan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberi keterampilan, pengembangan pengetahuan, pengetahuan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan sehingga masyarakat dapat mencapai kemandirian.

**b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan individu, keluarga, kelompok masyarakat ataupun komunitas dari keadaan atau tidak kurang berdaya menjadi mempunyai daya guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kodisi atau taraf hidup masyarakat terutama pada lingkungan komunitas yang bersangkutan. Oleh sebab itu pemberdayaan individu maupun kelompok masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan yang bertujuan

a. Untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan.

- b. Untuk meningkatkan kekampuan berprakarsa secara mandiri agar kehidupan seseorang atau kelompok dimasa datang lebih baik dan lebih sejahtera dari pada kehidupan sekarang.
- c. Mengembangkan usaha dan kemampuan dalam pengambilan keputusan.
- d. Masyarakat berdaya adalah masyarakat yang memiliki kekuasaan atau kemampuan kognisi, psikomotorik, dan efektif terhadap urusan sosial (akses terhadap dasar dasar produksi tertentu), politik (kemandirian dalam pengambilan keputusan) dan psikologis untuk membangun kepercayaan diri.

Tujuan lainnya dari suatu proses pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya karena ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).

#### c. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pandangan Gunawan(Puastiningsih 2017). Konsep mengenai pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

1. Pemberdayaan dengan menciptakan iklim yang dapat meningkatkan potensi masyarakat sehingga masyarakat dapat berkembang.
2. Pemberdayaan untuk potensi ekonomi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, misalnya peningkatan taraf peningkatan, derajat

kesehatan, akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, informasi, teknologi, lapangan usaha dan pasar.

3. Pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi masyarakat, melalui perlindungan dan pencegahan terhadap terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kebersamaan serta kemitraan antara yang sudah maju dan yang belum berkembang.

Pandangan dari David Matarrita-Cascante dan Mark A. Brennan dalam jurnal “Conceptualizing community development in the twenty-first century”, konsep mengenai pemberdayaan masyarakat saat ini adalah proses yang melibatkan organisasi, fasilitasi, dan tindakan, yang memungkinkan orang untuk membangun cara untuk menciptakan komunitas yang ingin mereka tinggali. Ini adalah proses yang memberikan visi, perencanaan, arahan, dan tindakan terkoordinasi menuju tujuan yang diinginkan terkait dengan promosi upaya yang ditujukan untuk meningkatkan kondisi di mana sumber daya lokal beroperasi. Dalam hal ini, pengembang komunitas memanfaatkan sumber daya ekonomi, manusia, dan fisik setempat untuk mengamankan kebutuhan sehari-hari dan menanggapi perubahan kebutuhan dan kondisi(Puastiningsih 2017).

d. Tahapan-Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

1. Seleksi Lokasi/Wilayah Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar pemilihan lokasi

dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan.

2. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat, merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi (berperan dan terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan.
3. Proses Pemberdayaan Masyarakat Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal berikut:
  - a. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi baik potensi maupun permasalahannya.
  - b. Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian.
  - c. Menerapkan rencana kegiatan kelompok. Rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping

selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang konkret dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal.

- d. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif (participatory monitoring and evaluation/PME). PME adalah suatu proses penilaian, pengkajian, dan pemantauan kegiatan, baik prosesnya maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan.
- e. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan atau Pembangunan
  - a. Partisipasi Pikiran  
Partisipasi ini dilakukan masyarakat dengan memberikan sumbang ide atau gagasan yang dimiliki oleh masyarakat.
  - b. Partisipasi Tenaga  
Partisipasi ini dilakukan masyarakat dengan memberikan sumbang tenaga.
  - c. Partisipasi Harta  
Partisipasi ini dapat dilakukan masyarakat dengan memberikan sumbang berupa harta atau uang dan makanan yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan.
- f. Bentuk-Bentuk Partisipasi Dibagi Menjadi Empat Pengertian
  - 1) Partisipasi dapat bersifat transitif atau intransitif.
  - 2) Partisipasi bermoral atau tidak bermoral. Partisipasi memenuhi sisi moral apabila tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan etika.

- 3) Partisipasi yang bersifat dipaksa dan bersifat bebas.
- 4) Partisipasi yang bersifat manipulatif atau spontan.

g. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan, meliputi:

- 1) Komitmen anggota masyarakat terhadap pembangunan partisipasi adalah kuat, rasa kebersamaan, kesadaran, dan keikhlasan anggota masyarakat tinggi.
- 2) Sarana untuk menunjang pembangunan partisipatif (tenaga, dana, dan bahan).
- 3) Program kegiatan pembangunan partisipasi adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Sedangkan faktor-faktor penghambat meliputi:

- 1) Sosialisasi mengenai partisipatif belum dilakukan kepada seluruh kelompok.
- 2) Koordinasi kegiatan pembangunan partisipatif belum dilaksanakan secara positif.
- 3) Perumusan program dan kegiatan pembangunan partisipatif lebih merupakan datar keinginan, bukan program dan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat.

h. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan

Terbentuknya suatu negara pasti memiliki tujuan untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dibentuklah pemerintah. Pembentukan pemerintah ini

memunculkan keberadaan dua kelompok, yakni orang yang memerintah di satu pihak yang memerintah di lain pihak.

Pengertian pemerintah dapat dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja. (W. Riawan Tjandra 2009).

1. Pemerintah di Indonesia dibagi berdasarkan tingkatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan keberadaan desentralisasi yang berlaku pada masing-masing Negara dan pemerintahan. Hal ini didukung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Undang-Undang yang dimaksud antara

lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dan yang terakhir yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 17 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam pemerintahan modern Ryaas Rasyid menjelaskan bahwa fungsi pemerintahan dapat dibagi menjadi empat bagian yakni sebagai berikut:

1. Dalam pemerintahan modern dewasa ini Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (*public service*).
2. Pembangunan (*development*).
3. Pemberdayaan (*empowering*)

#### 4. Pengaturan (*regulation*)

Peran pemerintah dalam pemberdayaan menurut Muhadam Labolo (2010) adalah mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain :

a) Pemerintah Sebagai Regulator

Peran Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

b) Pemerintah Sebagai Dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluhan maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

c) Pemerintah Sebagai Fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai

kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Menurut Nuramelia (2014) Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan Undang-Undang di kawasan tertentu yang merupakan kawasan yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah dalam arti luas di definisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit adalah suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

Menurut Ryaas Rasyid, tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tenram dan damai. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah:

### 1. Fungsi Pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

### 2. Fungsi Pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (Public service) dan pelayanan sipil (Civil service) yang menghargai kesetaraan.

### 3. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang di desentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

## 2. Konsep Sampah

### a. Definisi Sampah

Sampah merupakan hasil buangan dari kegiatan/aktivitas manusia maupun alam yang sudah tidak terpakai lagi dan dapat menganggu bagi keberlangsungan hidup suatu lingkungan. Jumlah volume sampah yang dihasilkan akan sebanding dengan jumlah penduduk, jenis aktivitas yang dilakukan, dan tingkat serta pola konsumsi penduduk yang ada. Semakin besar jumlah atau tingkat dan pola konsumsi maka akan semakin besar pula jumlah volume sampah yang dihasilkan.

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2005). Dalam Undang-Undang No.18 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Kementerian Lingkungan Hidup, 2007). Pemerintah bertanggung jawab dalam pengumpulan ulang dan pembuangan sampah dari pemukiman secara memadai. Namun karenaterdapat hal lain yang harus diprioritaskan dalam pembangunan di daerah setakurangnya dana penunjang untuk operasionalisasi pengelolaan persampahan, menjadikan pada beberapa daerah kegiatan pengelolaan sampah ini tidak seperti yang diharapkan.

Hal ini makin diperkuat dengan belum diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tersebut. Beberapa kondisi umum yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan selama ini, di mana sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah. Dari sini sampah diangkut oleh truk ke landfill yang umumnya kurang terkontrol, dimana para pemulung mencari barang-barang yang dapat didaur ulang.

Keberadaan sampah dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola secara baik dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak terhadap lingkungan, baik dampak terhadap komponen fisik kimia (kualitas air dan udara), biologi, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan lingkungan. Dampak operasional TPA terhadap lingkungan akan memicu terjadinya konflik sosial antar komponen masyarakat. Pada tahap pembuangan akhir/pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

b. Jenis dan Sumber Pengololaan Sampah

Dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis sampah yang diatur adalah:

a) Sampah rumah tangga

Yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah atau dari komplek perumahan.

b) Sampah sejenis sampah rumah tangga

Yaitu sampah rumah tangga yang bersala bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain seperti pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya.

c) Sampah Spesifik

Yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi, sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti batere bekas, bekas toner, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat bencana, puing bongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil kerja bakti).

Mekanisme pengelolaan sampah dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi, Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya), menggunakan ulang sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di sumbernya dan atau di tempat pengolahan. Pengurangan sampah akan diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri, kegiatan yang termasuk dalam pengurangan sampah ini adalah :

- a. Menetapkan sasaran pengurangan sampah
- b. Mengembangkan teknologi bersih dan label produk
- c. Menggunakan bahan produksi yang dapat di daur ulang atau diguna ulang
- d. Fasilitas kegiatan guna atau daur ulang
- e. Mengembangkan kesadaran program guna ulang atau daur ulang.

Penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penaganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemprosesan aktif kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan.

#### c. Sistem Pengelolaan Sampah

Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan kebijakanpolitik khususnya mengenai pengelolaan sampah dan hendaknya didukung penuh oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam teknis perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangannya. Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu sebagai salah satu upaya pengelolaan sampah perkotaan adalah konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan mengembangkan suatu sistem pengelolaaan sampah yang modern, dapat diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah lingkungan.

Dalam sistem tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif. Pendekatan

yang digunakan dalam konsep rencana pengelolaan sampah ini adalah meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang dapat memenuhi tuntutan dalam pengelolaan sampah yang berbasis peran serta masyarakat.

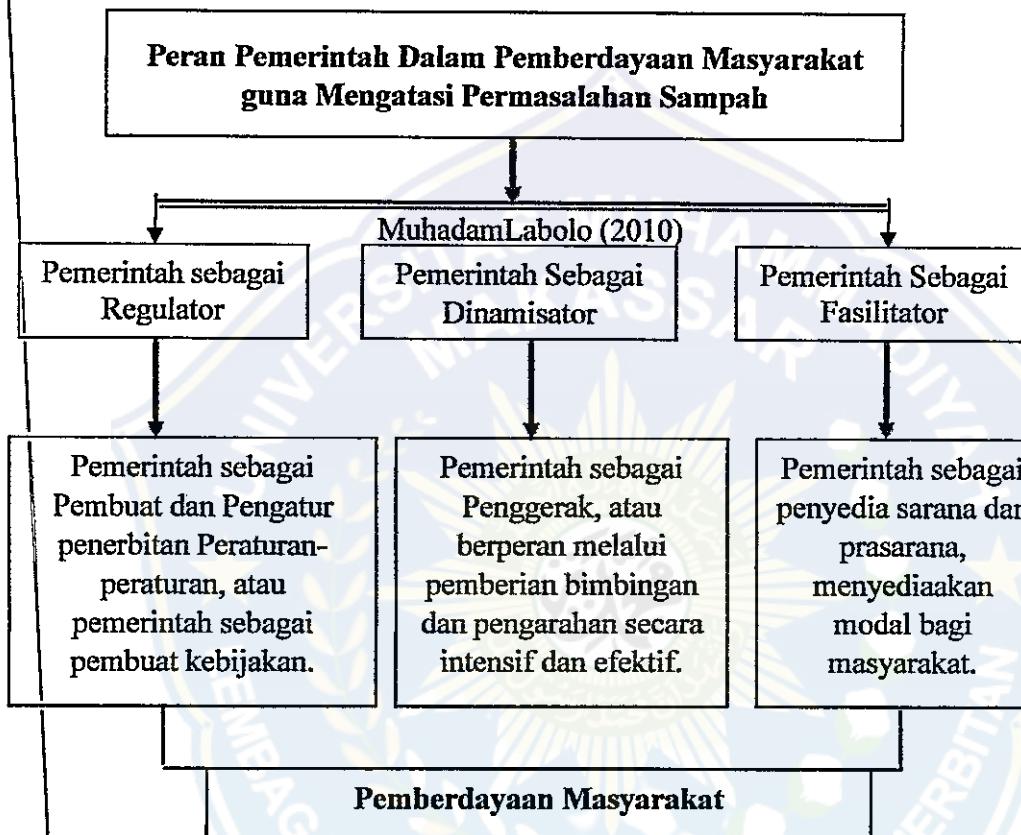
Dalam pengelolaan sampah perkotaan yang ideal, sistem manajemen persampahan yang dikembangkan harus merupakan sistem manajemen yang berbasis pada masyarakat yang di mulai dari pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Dalam rencana pengelolaan sampah perlu adanya metode pengolahan sampah yang lebih baik, peningkatan peran serta dari lembaga-lembaga yang terkait dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, peningkaan aspek ekonomi yang mencakup upaya meningkatkan retribusi sampah dan mengurangi beban pendanaan serta peningkatan aspek legal dalam pengelolaan sampah.

- a. Pemilihan
- b. Pengumpulan
- c. Pengangkutan

#### C. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa untuk mengetahui Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Guna Mengatasi Permasalahan Sampah dimana Belum adanya tempat pengangkutan sampah yang memadai dan dinilai masih kurang karena tidak dapat mengangkut sampah sehingga banyak sampah yang masih berserakan disekitar lingkungan masyarakat

itu sendiri. Selain itu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk sedikit berpartisipasi mengatasi masalah sampah tersebut.



Gambar 2.1

Hal ini perlu untuk diteliti yaitu karna untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Guna Mengatasi Permasalahan Sampah Di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa.

#### D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah kemampuan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat guna mengatasi permasalahan sampah di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa yaitu bagaimana Peran Pemerintah Dalam Memberdayakan Masyarakat agar permasalahan sampah bisa teratasi dimana permasalahannya

yaitu Belum adanya tempat pengangkutan sampah yang memadai dan dinilai masih kurang karena tidak dapat mengangkut sampah sehingga banyak sampah yang masih berserakan disekitar lingkungan masyarakat itu sendiri. Selain itu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk sedikit berpartisipasi mengatasi masalah sampah tersebut.

#### **E. Deskripsi Fokus Penelitian**

Adapun sub-sub fokus dari fokus penelitian “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Guna Mengatasi Permasalahan Sampah di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa, adalah :

##### **1. Pemerintah Sebagai Regulator**

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, Pemerintah sebagai Pembuat dan Pengatur penerbitan Peraturan-peraturan, atau pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

##### **2. Pemerintah Sebagai Dinamisator**

Pemerintah sebagai dinamisator Pemerintah sebagai Penggerak, atau berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluhan maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan.

### 3. Pemerintah Sebagai Fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator adalah Pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana, Serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

### 4. Aspek atau jenis-jenis kegiatan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dengan melibatkan masyarakat di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa antara lain yaitu :

1. Masyarakat dilibatkan dengan pengadaan peralatan pemberdayaan seperti memberikan sumbangsi penyediaan tempat sampah,
2. Masyarakat dilibatkan diberbagi kegiatan sosialisasi, musyawarah, penyuluhan dan pelatihan yang diadakan pemerintah guna dibantu pengetahuannya serta,
3. Masyarakat juga dapat ikut menyumbangkan pikiran serta masyarakat dilibatkan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi**

Waktu penelitian yang digunakan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 (dua) bulan. Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa karena peneliti ingin melihat Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Guna Mengatasi Permasalahan Sampah di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa.

#### **B. Jenis dan tipe penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa perspektif teori yang didukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi, dikarenakan kajiannya adalah fenomena masyarakat yang selalu mengalami perubahan (dinamis), yang sulit di ukur dengan menggunakan angka-angka maka penelitian ini membutuhkan analisis yang lebih mendalam dari sekedar penelitian kuantitatif yang sangat bergantungan pada kuantifikasi data. Penelitian ini mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh masyarakat terhadap suatu fenomena.

#### **C. Informan**

Informan penelitian ini akan diwawancara untuk mendapatkan jawaban berkaitan dengan Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Guna Mengatasi Permasalahan Sampah Di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa.

Lurah dan Sekretaris Lurah Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa	H. Mukhtar Ninra S.Sos M.Adm.Kp Wahyuni Wahab S.E
Ketua Rt 1 Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa	Bapak Suhardi
Kasi Pengembangan dan Permberdayaan Masyarakat (Penpelmas)	Ibu Roslina, S.Sos
Masyarakat Kelurahan Tamarunang	DG. Erang
Pengurus Bank sampah Al Mutayyar	Suriati Dg Kanang

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan:

##### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan penelitian dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara, dalam melakukan observasi, penulis menggunakan pedoman observasi sebagai instrumen pengamatan. Observasi Jenis field research yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dimana penulis terjun langsung mendatangi informan. Seperti observasi dua lahan di jalan

Tamarunang 1 yang dijadikan tempat pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat, dimana lahan tersebut sudah sangat kumuh dan penuh dengan sampah, observasi tempat berdirinya bank sampah al mutsyar kelurahan Tamarunang.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan berkomunikasi secara tatap muka. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara kepada pemerintah dan beberapa masyarakat kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokument-dokumen. Data yang dikumpulkan menggunakan pengumpulan data dokumentasi cenderung bersifat data sekunder. Misalnya, foto, video, dan arsip. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara meneliti dokumen yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti

## E. Teknik Analisis Data

Tehnik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang dikumpulkan sehingga data tersebut dapat ditemukan kesimpulan dan dijadikan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan tehnik analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu data yang diperoleh yang dikembangkan melalui pola hubungan tertentu atau menjadi

hipotesis. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas tersebut berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ditemukan dilapangan lalu di catat.

b. Reduksi Data

Data identifikasi satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian, kemudian memberikan kode pada setiap satuan agar dapat ditelusuri dari mana sumber data sehingga peneliti dapat menarik kesimpulannya, proses reduksi dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokan berdasarkan kemiripan.

c. Penyajian Data

Penyajian data pengumpulan informasi terusan yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini data yang sudah dikategorikan berikutnya di organisasikan sebagai bahan kajian data. Kemudian secara keseluruhannya sebagai gambaran dan sebagai penentu dari aspek yang diteliti.

#### d. Vertifikasi Data

Langkah selanjutnya yang sangatlah penting adalah vertifikasi data atau kesimpulan. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari selama kongfigurasi yang utuh

### F. Teknik Pengabsahan Data

Teknik pengabsahan data memuat teknik untuk pengabsahan data penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektifitas). Teknik lainnya dengan berbagai uji tetap diperbolehkan selama memiliki referensi yang jelas.

## BAB IV

## **PEMBAHASAN**

Pada bab IV ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan terkait judul Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Guna Mengatasi Permasalahan Sampah di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa. Peneliti juga akan memaparkan Profil lokasi penelitiannya.

## A. Deskripsi Objek Peneltian

## 1. Letak Geografis Kabupaten Gowa

Secara geografis, Kabupaten Gowa terletak pada  $5^{\circ}33' - 5^{\circ}34'$  Lintang Selatan dan  $120^{\circ}38' - 120^{\circ}33'$  Bujur Timur. Luas wilayah kabupaten Gowa adalah  $\pm 1.883,33$  km $^2$ .

#### a. Topografi

Kabupaten Gowa terdiri dari wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10-2800 meter di atas permukaan air laut. Namun demikian wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26% terutama di bagian timur hingga selatan karena merupakan Pegunungan Tinggi Moncong, Pegunungan Bawakaraeng-Lompobattang dan Pegunungan Batureppe-Cindako. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30%

mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km<sup>2</sup> dengan panjang sungai utama 90 Km.

#### b. Batas wilayah

Letak dan luar wilayah yang berada pada Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta. Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros Kota Makassar dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto dan sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan salah satu daerah kabupaten tetangga yang saling membantu dalam faktor ekonomi dan pertanian. Kabupaten Gowa memiliki Luas wilayah 1.883,33 km<sup>2</sup> atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan salah satu wilayah yang sangat luas dari kabupaten lain seperti Bantaeng dan lainnya. Wilayah Kabupaten Gowa mempunyai 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni

Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. 39 Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan. Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah diatas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km<sup>2</sup> dan panjang 90 Km Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km<sup>2</sup> yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha, komsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m<sup>3</sup> dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt. Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret yang biasa di manfaatkan oleh masyarakat untuk bertani khususnya menanam padi. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan 4 April-Mei dan Oktober-

November yang biasa di bulan ini selain digunakan untuk menanam padi bayak juga petani memanfaatkan untuk menanam sayuran, buah-buahan dan banyak lagi tanaman yang di tanam karna di musim ini curah hujan yang rendah atau jarang hujan di karenakan musim ini musim kemarau inilah banyak masyarakat yang memanfaatkan untuk bertani. Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu 27,125°C. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli-September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan. Untuk lebih jelasnya gambaran umum kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Gowa berdasarkan komposisi luas dan jarak dari Sungguminasa sebagai Ibu kota Kabupaten Gowa.

#### c. Iklim

Wilayah kabupaten Gowa menurut klasifikasi iklim Koppen beriklim muson tropis (*Am*) dengan dua musim yang dipengaruhi oleh pergerakan angin muson, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim kemarau di wilayah Gowa disebabkan oleh hembusan angin muson timur-tenggara yang bersifat kering dan tidak banyak membawa uap air dan terjadi pada periode Mei hingga Oktober. Sementara itu, musim penghujan di wilayah Kabupaten ini diakibatkan oleh hembusan angin muson barat laut-barat daya yang bersifat basah dan lembab. Musim penghujan di wilayah Gowa berlangsung pada periode November hingga April dengan bulan terbasah adalah Januari yang curah hujan bulanannya lebih dari 500 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Gowa berkisar pada angka 2.000–3.000 mm per tahun dengan jumlah

hari hujan berkisar antara 100–180 hari hujan per tahun. Suhu udara di wilayah kabupaten Gowa berkisar pada angka 22°–33 °C dengan tingkat kelembapan nisbi ±81%.

### Data Iklim Kabupaten Gowa

Tabel 4.1

Data iklim Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia														
Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Ju n	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Tahu n	
Rata-rata tertinggi °C (°F)	29.2 (84. 6)	29.4 (84. 9)	30.1 (86. 2)	30.7 (87. 3)	31.1 (88)	30. 6 (87. .1)	30.7 (87. 3)	31.2 (88. 2)	31.5 (88. 7)	32.5 (90. 5)	31.7 (89. 1)	30.3 (86. 5)	30.75 (87.3 7)	
Rata-rata harian °C (°F)	26.1 (79. 3)	26.3 (79. 5)	26.4 (79. 2)	26.8 (80. 4)	26.9 (80. 4)	25. 8 (78. .4)	25.8 (78. 4)	26.2 (79. 2)	26.8 (80. 2)	27.6 (80. 7)	26.7 (80. 1)	26.1 (79. 1)	26.46 (79.6 2)	
Rata-rata terendah °C (°F)	23.9 (75. 9)	23.3 (73. 2)	22.9 (73. 2)	22.9 (73. 2)	22.8 (73)	21. 8 (71. .2)	20.9 (69. 6)	21.4 (70. 5)	21.9 (71. 4)	22.8 (73)	23.8 (74. 8)	23.9 (75)	22.69 (72.8 2)	
Presipitasi mm (inci)	604. 5 (23. 799)	552. 8 (21. 764)	376. 6 (14. 827)	197. 3 (7.7 68)	85.4 (3.3 62)	70. 6 (2. 78)	44.9 (1.7 68)	23.5 (0.9 25)	36.2 (1.4 25)	66.7 (2.6 26)	220. 4 (8.6 77)	493. 1 (19. 413)	2.772 (109. 134)	
Rata-rata hari hujan	24	23	20	17	8	6	4	2	3	5	18	22	152	
% kelembapan	87.1	86.2	85.6	83.7	82.1	80. 4	77.2	74.1	76.4	79.3	81.6	85.7	81.62	
Rata-rata sinar matahari harian	5.3	5.8	6.4	7.5	8.2	8.7	9.5	10.3	9.7	8.9	7.6	5.9	7.82	

Sumber 1: Weatherbase

Sumber 2: Climate-Data.org

#### d. Demografi

Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Gowa adalah bahasa Indonesia. Menurut *Statistik Kebahasaan 2019* oleh badan satu bahasa daerah di Kabupaten Gowa, yaitu bahasa Makassar, khususnya dialek Lakiung, dialek Turatea, dan dialek Makassar Konjo.

#### e. Kecamatan

Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan, 46 kelurahan dan 121 desa. Pada tahun 2017, kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebesar 752.896 jiwa dengan sebaran penduduk 400 jiwa/km<sup>2</sup>.

#### Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Gowa

Tabel 4.2

Kode Kementerian Kendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
73.06.02	Bajeng	4	10	Desa	Bone Bontosunggu Lempangang Maccinibaji Maradekaya Pa'bentengang Panciro Pannyangkalang Paraikatte Tangkebjeng
					Kelurahan Kalebjeng Limbung Mata Allo Tubajeng

Kode Kementerian	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
73.06.18	Bajeng Barat		7	Desa	Bontomanai Borimatangkasa Gentungang Kalemandalle Mandalle Manjalling Tanabangka
73.06.12	Barombong	2	5	Desa	Biringala Kanjilo Moncobalang Tamannyeleng Tinggimae
				Kelurahan	Benteng Somba Opu Lembang Parang
73.06.11	Biringbulu	2	9	Desa	Batumalonro Baturappe Berutallasa Borimasunggu Julukanaya Lembangloe Parangloe Pencong Taring
				Kelurahan	Lauwa Tonrorita
73.06.15	Bontolempangan		8	Desa	Bontolempangan Bontoloe Bontotangnga Julumate'ne Lassa-Lassa Pa'ladinggang Paranglompoa Ulujangang

Kode Kemen dagri	Kecamata n	Jumla h Kelur ahan	Juml ah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurah an
73.06.06	Bontomarann u	3	6	Desa	Bili-Bili Mata Allo Nirannuang Pakatto Romangloe Sokkolia
				Keluraha n	Bontomanai Borongloe RomangLompoa
73.06.01	Bontonompo	3	11	Desa	Barembeng Bategulung Bontobiraeng Bontobiraeng Selatan Bontolangkasa Selatan Bontolangkasa Utara Bulogading Kalebarembeng Katangka Marjapai Romanglasa
				Keluraha n	Bontonompo Kalaserena Tamallayang
73.06.16	Bontonompo Selatan	1	8	Desa	Bontosunggu Jipang Pa'bundukang Salajangki Salajo Sengka Tanrara Tindang

Kode Kemen dagri	Kecamata n	Jumla h Kelur ahan	Juml ah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurah an
				Keluraha n	Bontoramba
73.06.09	Bungaya	2	5	Desa	Bissoloro Bontomanai Buakkang Mangempang Rannaloe
				Keluraha n	Je'nebatu Sapaya
73.06.14	Manuju		7	Desa	Bilalang Manuju Moncongloe Pattallikang Tamatatea Tana Karaeng Tassese
73.06.07	Pallangga	4	12	Desa	Bontoala Bontoramba Bungaejaya Jene'tallasa Julubori Julukanaya Julupa'mai Kampili Pallangga Panakkukang Taeng Toddotoa
				Keluraha n	Mangalli Pangkabinanga Parangbanoa Tetebatu

Kode Kemen dagri	Kecamata n	Jumla h Kelur ahan	Juml ah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurah an
73.06.05	Parangloe	2	5	Desa	Belabori Belapunranga Bontokassi Borisallo Lonjoboko
				Keluraha n	Bontoparang Lanna
73.06.17	Parigi		5	Desa	Bilanrengi Jonjo Majannang Manimbahoi Sicini
73.06.13	Pattallassang		8	Desa	Borongpa'la'la Je'nemadinging Pacellekang Pallantikang Panaikang Pattallassang Sunggumanai Timbuseng
73.06.08	Somba Opu	14		Keluraha n	Batangkaluku Bonto-Bontoa Bontoramba Kalegowa Katangka Mawang Paccinongang Pandang- Pandang Romangpolong Samata Sungguminasa Tamarunang Tombolo Tompobalang

Kode Kementerian	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
73.06.04	Tinggimoncong	6	1	Desa	Parigi
				Kelurahan	Bonto Lerung Bulutana Gantarang Garassi Malino Pattapang
73.06.03	Tompobulu	2	6	Desa	Bontobuddung Datara Garing Rappoala Rappolemba Tanete
				Kelurahan	Cikoro Malakaji
73.06.10	Tombolo Pao	1	8	Desa	Balassuka Bolaromang Erelembang Kanreapia Mamampang Pao Ta'binjai Tonasa
				Kelurahan	Tamaona
	<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>121</b>		

#### f. Ekonomi

Pertambangan Bahan-bahan galian golongan C di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Jenebarang, seperti pasir, batu kali, dan kerikil secara turun-temurun mampu memberikan nafkah bagi penduduk sekitarnya. Kontribusi sektor ini dalam kegiatan ekonomi tahun 2000 nilainya mencapai Rp. 105,4 miliar atau 9,13 persen, tetapi sumbangannya sektor ini terhadap kas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) cukup signifikan.

Pada tahun anggaran 2001, Pemkab menargetkan Rp. 2,03 miliar dari pajak bahan galian golongan C untuk mengisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan penggalian memang cukup besar karena selain tersedianya material dari DAS, juga ada batu gunung dan tanah liat. Truk-truk lalu-lalang mengangkut material ini di sepanjang jalan protokol yang menghubungkan Kabupaten Gowa dengan Kota Makassar.

Bahan galian memang mampu memberikan pemasukan yang besar bagi kas Pemkab Gowa. Pos pajak ini mendominasi pendapatan hingga mencapai 65 persen dalam PAD tahun anggaran 2001 yang besarnya Rp. 3,11 miliar.

#### g. Pertanian

Potensi Kabupaten Gowa yang sesungguhnya adalah sektor pertanian. Pekerjaan utama penduduk kabupaten yang pada tahun 2000 lalu berpendapatan per kapita Rp. 2,09 juta ini adalah bercocok tanam, dengan sub sektor pertanian tanaman pangan sebagai andalan. Sektor pertanian memberi kontribusi sebesar 45 persen atau senilai Rp. 515,2 miliar. Lahan persawahan yang tidak sampai 20 persen (3,640 hektare) dari total lahan kabupaten mampu memberikan hasil yang

memadai. Dari berbagai produksi tanaman pertanian seperti padi dan palawija, tanaman hortikultura menjadi primadona.

Kecamatan-kecamatan yang berada di dataran tinggi seperti Parangloe, Bungaya dan terutama Tinggi moncong merupakan sentra penghasil sayur-mayur. Sayuran yang paling banyak di budidayakan adalah kentang, kubis, sawi, bawang daun dan buncis. Per tahunnya hasil panen sayur-sayuran melebihi 5.000 ton. Sayuran dari Kabupaten Gowa mampu memenuhi pasar Kota Makassar dan sekitarnya, bahkan sampai ke Pulau Kalimantan dan Maluku melalui Pelabuhan Parepare dan Pelabuhan Mamuju.

Selain bertani sayur yang memiliki masa tanam pendek, petani Gowa juga banyak yang bertani tanaman umur panjang. Salah satunya adalah tanaman markisa (*Fassiforasp*). Mengunjungi Makassar kurang afdal rasanya kalau tidak membawa buah tangan sirup atau *juice* markisa. Jika kita melihat pemandangan di bandara atau pelabuhan, kebanyakan para calon penumpang yang akan meninggalkan Makassar membawa sari buah beraroma segar ini. Tanaman yang berasal dari daratan Amerika Selatan ini identik dengan Sulawesi Selatan. Desa Kanreapia, Kecamatan Tinggimoncong merupakan salah satu daerah penghasil markisa di Kabupaten Gowa. Sayangnya markisa yang rasa buahnya manis asam dan mampu menggerakkan industri kecil makanan dan minuman ini kini mulai kurang diminati petani. Menanam markisa memang tidak mudah, kecuali karena masa tanamnya panjang dan memerlukan perawatan khusus, seperti tinggi permukaan tanah, pupuk dan obat-obatan yang cukup mahal.

Selain itu harga markisa juga tidak stabil dan cenderung terus menurun. Tanaman merambat ini memiliki satu masa panen per tahun (November-Januari)

dengan produksi sekitar 300.000 buah per hektar. Jika harga pada masa panen raya, satu kilo (kurang lebih 25 buah) hanya Rp. 500,- sampai Rp. 800, sehingga para petani hanya menerima Rp 6,0 juta sampai Rp 9,6 juta per hektarnya. Keadaan ini yang mendorong luas tanam markisa terus menurun. Pada tahun 1996 terdapat 1.241 hektare dengan produksi 21.861 ton. Empat tahun kemudian luas tanam menjadi 854 hektar dengan produksi 7.189 ton. Petani banyak beralih tanam dari markisa ke sayuran karena lebih pendek masa tanamnya.

## 2. Sejarah Kabupaten Gowa

Dalam khasanah sejarah nasional, nama Gowa sudah tidak asing lagi. Mulai abad ke-15, Kerajaan Gowa merupakan kerajaan maritim yang besar pengaruhnya di perairan Nusantara. Bahkan dari kerajaan ini juga muncul nama pahlawan nasional yang bergelar Ayam Jantan dari Timur, Sultan Hasanuddin, Raja Gowa XVI yang berani melawan VOC Belanda pada tahun-tahun awal kolonialisasinya di Indonesia. Kerajaan Gowa memang akhirnya takluk kepada Belanda lewat Perjanjian Bungaya. Namun meskipun sebagai kerajaan, Gowa tidak lagi berjaya, kerajaan ini mampu memberi warisan terbesarnya, yaitu Pelabuhan Makassar. Pelabuhan yang kemudian berkembang menjadi Kota Makassar ini dapat disebut anak kandungnya, sedangkan Kerajaan Gowa sendiri merupakan cikal bakal Kabupaten Gowa sekarang. Kota Makassar lebih dikenal khalayak dibandingkan dengan Kabupaten Gowa. Padahal kenyataannya sampai sekarang Kabupaten Gowa ibaratnya masih menjadi ibu bagi kota ini. Kabupaten yang hanya berjarak tempuh sekitar 10 menit dari Kota Makassar ini memasok sebagian besar kebutuhan dasar

kehidupan kota. Mulai dari bahan material untuk pembangunan fisik, bahan pangan, terutama sayur-mayur, sampai aliran air bersih dari Waduk Bili-bili.

Kemampuan Kabupaten Gowa menyuplai kebutuhan bagi daerah sekitarnya dikarenakan keadaan alamnya. Kabupaten seluas 1.883,32 kilometer persegi ini memiliki enam gunung, di mana yang tertinggi adalah Gunung Bawakaraeng. Daerah ini juga dilalui Sungai Jeneberang yang di daerah pertemuannya dengan Sungai Jenelata dibangun Waduk Bili-bili. Keuntungan alam ini menjadikan tanah Gowa kaya akan bahan galian, di samping tanahnya subur.

### 3. Letak Geografis Kelurahan Tamarunang



**Struktur Organisasi Kelurahan Tamarunang Kec. Somba Opu Kabupaten**

**Gowa**

**Gambar 4.1**

Tamarunang adalah Kelurahan di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi selatan, Indonesia. Tamarunang terletak 3 km dari ibu kota kabupaten dan memiliki luas 3,33 Ha/Km dan kelurahan tamarunang terbagi dari dua lingkungan yaitu lingkungan Beroanging dan lingkungan Panggentungan. Kelurahan Tamarunang terdiri dari 14 Rw dan 75 Rt.

Kondisi geografis Kelurahan Tamarunang memiliki ketinggian 5-6 m dari permukaan laut, curah hujan rata-rata 2.562 mm pertahun dan keadaan suhu rata-rata 32° Topografi atau bentang lahan, datar 333 Ha dan berbukit 5 Ha. Batas-batas wilayah kelurahan tamarunang sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kelurahan RomangPolong
2. Sebelah Barat : Kelurahan Batangkaluku
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Palangga
4. Sebelah Timur : Kelurahan Mawang

## **2. Kondisi Monografi**

### a. Keadaan Penduduk

Secara kuantitatif penduduk Kelurahan Tamarunang berjumlah 15.583 jiwa/orang. Jumlah tersebut terbagi menjadi 3.696 kepala keluarga/KK.

**Tabel4.3**

### **Jumlah penduduk menurut jenis kelamin Kelurahan Tamarunang**

Menurut jenisnya	Jumlahnya
Penduduk dengan jenis kelamin laki-laki	7.938 jiwa
Penduduk dengan jenis kelamin perempuan	7.594 jiwa

### b. Pendidikan

Untuk mengetahui keadaan pendidikan penduduk Kelurahan Tamarunang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4**  
**Penduduk Menurut Pendidikan Kelurahan Tamarunang**

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Buta Huruf	110
2	Masih Sekolah	3.196

3	Tidak Tamat SD	752
4	Tamat Sd	1.104
5	Tamat SLPT	2.054
6	Tamat SLTA	3.832
7	D2	19
8	D3	60
9	S1	879
10	S2	219
11	S3	2
12	Tidak Sekolah	1.988
Jumlah		14.212

Berdasarkan tabel IV dapat di lihat bahwa warga telah mulai meningkatkan kesadaran akan pendidikan pada kelurahan tamarunang sehingga dapat di lihat lulusan SD, SMP dan SMA menempati urutan pertama, kedua dan ketiga. Untuk mengetahui sarana pendidikan yang ada di kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.5**  
**Sarana Pendidikan Kelurahan Tamarunang**

No.	Jenis lembaga pendidikan	Frekuensi	Guru	Murid
1	Taman kanak-kanak (TK)	9	33	314
2	SD	3	50	1.512
	Jumlah	12	83	1.826

Sarana pendidikan di Kelurahan Tamarunang dapat di bilang tidak cukup, karena di kelurahan yang penduduknya 15.583 jiwa belum mempunyai sarana pendidikan SMP dan SMA.

c. Agama

Untuk mengetahui jumlah penduduk menurut agama di Kelurahan Tamarunang dapat di lihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.6**

**Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama**

No.	Penduduk yang beragama	Jumlah
1	Islam	13.081 orang
2	Kristen	62 orang
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
Jumlah		13.143 orang

Kehidupan keagamaan masyarakat Kelurahan Tamarunang adalah mayoritas umat muslim, hal ini di tunjukkan pada tabel IV bahwa jumlah penduduk muslim lebih banyak dari agama lain. Muslim sendiri dalam lingkungan ini memiliki perkembangan yang cukup luas. Banyak dari aliran-aliran muslim itu sendiri, diantaranya adanya aliran Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU), Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Aliran-aliran ini juga mempengaruhi kerangka pikir masyarakat dalam melestarikan budaya dan tradisi warisan leluhur. Masyarakat NU menjadi masyarakat muslim dominan di Kelurahan Tamarunang dan masyarakat inilah

yang masih dan terus melestarikan budaya leluhur, untuk masyarakat aliran Muhammadiyah sudah tidak percaya dengan hal-hal ini karena di anggap bid'ah. Kelurahan Tamarunang terdiri dari 17 masjid dan 3 mushollah.

## B. Hasil Penelitian

Penelitian ini akan mendeskripsikan Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Guna Mengatasi Permasalahan Sampah di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa. Sebagaimana telah dibentuk beberapa peraturan oleh pemerintah kabupaten gowa yaitu peraturan daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2017 tentang kebersihan. Kemudian Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 44 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) dan Surat Edaran Bupati Gowa Nomor 188 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah. Untuk pengelolaan sampah memiliki 28 mobil yang dikhkususkan di wilayah Kecamatan Somba Opu dan Pallangga, 121 truk sampah di desa di Kabupaten Gowa, 105 motor sampah di kelurahan, 3 kontainer, 1 TPA, 32/2 TPS, 46 bank sampah dan 1 induk Bank Sampah dan 1 TPS 3R.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa yaitu Walaupun sudah terdapat beberapa sarana prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Gowa (Pemkab) gowa untuk setiap Kelurahan, namun penanganan sampah ini tetap butuh keterlibatan semua pihak termasuk komunitas pemerhati lingkungan dan masyarakat. Apalagi salah satu permasalahan yang ditangani bersama adalah masih ada masyarakat yang kadang sering membuang sampah sembarang yang edukasi sehingga disinilah diperlukan

adanya peran Pemerintah Kelurahan Tamarunang Khususnya dalam memberdayakan masyarakatnya guna mengatasi permasalahan sampah.

Berdasarkan hasil penelitian untuk mengaitkan dengan teori yang digunakan, adapun menurut Muhadam Labolo (2010) peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa indikator adalah sebagai berikut:

### **1. Pemerintah Sebagai Regulator**

Peran Pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Pemerintah sebagai Pembuat dan Pengatur penerbitan Peraturan-peraturan, atau pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Peran Pemerintah dalam hal pengembangan pemberdayaan kelompok masyarakat sangatlah penting karena pemerintahlah yang memberikan fasilitas yang dimiliki suatu daerah dapat berkembang.

Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 menyatakan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, disamping itu untuk terciptanya kondisi lingkungan yang bersih maka pemerintah maupun masyarakat agar senantiasa menjaga kondisi lingkungan sekitar sehingga tata kelola masyarakat akan baik dan bisa menjadi acuan kepada daerah lain sebagai daerah percontohan dalam tata kelola persampahan khususnya di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa. Kutipan Wawancara yang dilakukan bersama Bapak Lurah Kelurahan

Tamarunang H. Mukhtar Ninra, S.Sos. M.Adm. KP Kabupaten Gowa terkait peran pemerintah sebagai regulator dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan sampah di kelurahan Tamarunang dalam wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Pemerintah dalam hal ini terkait masalah sampah sudah berupaya semaksimal mungkin terkhusus sendiri untuk Kelurahan Tamarunang perannya itu kita sudah menyebarkan informasi-informasi baik itu lewat pengumuman masjid ke masjid, forum, maupun secara struktur organisasi pemerintah melalui Rukun warga (Rw) ke Rukun tetangga (Rt) sampai jajarannya ke bawah. Apalagi dalam hal ini pemerintah Kelurahan Tamarunang khususnya telah melakukan pencanangan dalam hal sabtu bersih, dimana setiap hari sabtu atau minggu masyarakat Kelurahan Tamarunang wajib melakukan kegiatan kerja bakti di setiap wilayah tempat tinggal masyarakat masing-masing.”(Wawancara 13 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran Pemerintah sebagai regulator di Kelurahan Tamarunang dalam hal mengatasi permasalahan sampah yaitu pemerintah mengeluarkan semacam aturan bahwa setiap hari sabtu atau minggu khususnya masyarakat diwajibkan untuk melakukan kegiatan kerja bakti yang diberi nama sabtu bersih. Selain itu Pemerintah Kelurahan Tamarunang dalam hal menanggulangi masalah sampah telah berupaya semaksimal mungkin dengan cara menyebarkan infomasi-infomasi melalui forum, pengumuman masjid ke masjid agar masyarakat selalu memperhatikan kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Lebih lanjut disampaikan oleh Ibu Roslina S.Sos Kasi Pengembangan dan Perberdayaan Masyarakat (PenpeMas) terkait peran pemerintah sebagai

regulator dalam hal pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah sampah adalah sebagai berikut:

“Di Kelurahan Tamarunang itu sendiri terdiri dari 14 Rw dan 75 Rt. dalam hal ini yang dilakukan pemerintah kelurahan terkait perannya sebagai regulator yaitu Pemerintah Kelurahan Tamarunang membuat semacam peringatan (papan bicara) atau informasi dengan cara memasang papan bicara di beberapa titik pembuangan sampah yang bertujuan untuk mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan”.(Wawancara 13 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran Pemerintah sebagai regulator di Kelurahan Tamarunang dalam hal mengatasi permasalahan sampah yaitu Pemerintah Kelurahan Membuat semacam peringatan (papan bicara) yang dipasang di beberapa titik pembuangan sampah yang bertujuan untuk mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, maka dapat disimpulkan peran Pemerintah sebagai regulator sangatlah penting, karena Pemerintah yang berperan sebagai pengatur atau pembuat dan yang menerbitkan peraturan-peraturan. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah sebagai regulator di Kelurahan Tamarunang sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik karena Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dan untuk menyeimbangkan penyelenggaran pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan seperti pemerintah Kelurahan Tamarunang khususnya telah melakukan pencanangan dalam hal sabtu bersih, dimana setiap hari sabtu atau minggu masyarakat Kelurahan Tamarunang wajib melakukan kegiatan kerja bakti di

setiap wilayah tempat tinggal masyarakat masing-masing. Selain itu Pemerintah Kelurahan Membuat semacam peringatan (papan bicara) yang dipasang di beberapa titik pembuangan sampah yang bertujuan untuk mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.

## **2. Pemerintah Sebagai Dinamisator**

Peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah berkaitan dengan peran Pemerintah sebagai penggerak atau berperan melalui pemberian bimbingan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan. Pemerintah sebagai Penggerak, atau berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif.

Pembinaan dan pengarahan ini sangat penting hal ini diperlukan untuk memelihara dinamika badan tertentu yang dapat memberikan pembinaan kepada masyarakat. Adapun kutipan wawancara yang dilakukan bersama Ibu Sekretaris Lurah Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa mengenai peran Pemerintah sebagai Dinamisator adalah sebagai berikut:

“Pembentukan Bank sampah memang sangatlah penting dimana perlu pembinaan terhadap masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dalam menyelenggarakan tentang daur ulang sampah sehingga bernilai ekonomi.” (Wawancara 14 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembentukan bank sampah adalah sangat penting sebagai wujud peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu dengan memberikan bimbingan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang sadar akan lingkungan bersih untuk melihat serta

menjadikan sampah sebagai barang yang dapat memberikan nilai ekonomi jika dikelola dengan baik.

Lebih lanjut disampaikan oleh Bapak Suhardi selaku Ketua Rt 1 Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa terkait peran Pemerintah Sebagai Dinamisator adalah sebagai berikut:

“Di Kelurahan Tamarunang itu sendiri masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pemanfaatan bank sampah yang telah dibentuk oleh pemerintah dengan menganggap bahwa proses yang harus dilakukan itu rumit dalam memenuhi kebutuhan pengguna ulang, mendaur dan penggunaan akhir”. (Wawancara 14 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat di kelurahan Tamarunang bahwa sampah sebenarnya mempunyai manfaat dan memiliki nilai ekonomi.

Adapun hasil wawancara dengan salah satu pengurus Bank Sampah Al Mutasyar Kelurahan Tamarunang Ibu Suriati Dg Kanang terkait peran Pemerintah sebagai Dinamisator adalah sebagai berikut:

“Di Bank Sampah Al Mutasyar Kelurahan Tamarunang itu sendiri ada beberapa jenis-jenis kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Tamarunang dengan melibatkan masyarakat antara lain masyarakat dilibatkan di berbagai kegiatan penyuluhan dan pelatihan seperti pembuatan bunga dari sampah plastik bekas, hiasan dinding dan lain sebagainya. Selain kegiatan pelatihan Pemerintah juga melibatkan masyarakat diberbagai penyuluhan tentang bahaya yang ditimbulkan dari sampah jika tidak dikelola dengan baik”. (Wawancara 14 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Bank Sampah yang telah didirikan atau dibentuk oleh Pemerintah kelurahan Tamarunang juga melakukan beberapa jenis-jenis kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Tamarunang dengan melibatkan masyarakat

antara lain masyarakat dilibatkan di berbagai kegiatan penyuluhan dan pelatihan seperti pembuatan bunga dari sampah plastik bekas, hiasan dinding dan lain sebagainya. Selain kegiatan pelatihan Pemerintah juga melibatkan masyarakat diberbagai penyuluhan tentang bahaya yang ditimbulkan dari sampah jika tidak dikelola dengan baik

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah sebagai dinamisator di Kelurahan Tamarunang sudah berjalan dengan baik dilihat dari peran Pemerintah dalam hal pemberian bimbingan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Dimulai dari pendirian Bank Sampah Al Mutsyar, dan memberikan atau melibatkan masyarakat di berbagai kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang dapat menambah pengetahuan masyarakat itu sendiri untuk memanfaatkan sampah sebagai suatu yang mempunyai nilai apabila dikelola dengan baik. Pemberian pendidikan sangatlah berperan penting bagi masyarakat. Karena dengan memberikan bantuan kepada masyarakat saat terjadi kendala itu sangat memudahkan masyarakat, dan masyarakat merasa mendapatkan perhatikan dan kepedulian dari pemerintah itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai dinamisator sangat bermanfaat bagi masyarakat selain membantu masyarakat saat terjadi kesulitan, juga membantu dalam proses pembangunan daerah.

### **3. Pemerintah Sebagai Fasilitator**

Peran Pemerintah sebagai Fasilitator yaitu Pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah).

Kode Kemen dagri	Kecamata n	Jumla h Kelur ahan	Juml ah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurah an
73.06.18	Bajeng Barat		7	Desa	Bontomanai Borimatangkasa Gentungang Kalemandalle Mandalle Manjalling Tanabangka
73.06.12	Barombong	2	5	Desa	Biringala Kanjilo Moncobalang Tamannyeleng Tinggimae
				Keluraha n	Benteng Somba Opu Lembang Parang
73.06.11	Biringbulu	2	9	Desa	Batumalonro Baturappe Berutallasa Borimasunggu Julukanaya Lembangloe Parangloe Pencong Taring
				Keluraha n	Lauwa Tonrorita
73.06.15	Bontolempangan		8	Desa	Bontolempangan Bontoloe Bontotangnga Julumate'ne Lassa-Lassa Pa'ladinggang Paranglompoa Ulujanggang

Kode Kementerian	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
73.06.06	Bontomarannu	3	6	Desa	Bili-Bili Mata Allo Nirannuang Pakatto Romangloe Sokkolia
					Kelurahan Bontomanai Borongloe RomangLompoa
73.06.01	Bontonompo	3	11	Desa	Barembeng Bategulung Bontobiraeng Bontobiraeng Selatan Bontolangkasa Selatan Bontolangkasa Utara Bulogading Kalebarembeng Katangka Manjapai Romanglasa
					Kelurahan Bontonompo Kalaserena Tamallayang
73.06.16	Bontonompo Selatan	1	8	Desa	Bontosunggu Jipang Pa'bundukang Salajangki Salajo Sengka Tanrara Tindang

Kode Kemen dagri	Kecamata n	Jumla h Kelur ahan	Juml ah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurah an
				Keluraha n	Bontoramba
73.06.09	Bungaya	2	5	Desa	Bissoloro Bontomanai Buakkang Mangempang Rannaloe
				Keluraha n	Je'nebatu Sapaya
73.06.14	Manuju		7	Desa	Bilalang Manuju Moncongloe Pattallikang Tamalatea Tana Karaeng Tassese
73.06.07	Pallangga	4	12	Desa	Bontoala Bontoramba Bungaejaya Jene'tallasa Julubori Julukanaya Julupa'mai Kampili Pallangga Panakkukang Taeng Toddotoa
				Keluraha n	Mangalli Pangkabinanga Parangbanoa Tetebatu

Kode Kemedagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
73.06.05	Parangloe	2	5	Desa	Belabori Belapunranga Bontokassi Borisallo Lonjoboko
				Kelurahan	Bontoparang Lanna
73.06.17	Parigi		5	Desa	Bilanrengi Jonjo Majannang Manimbahoi Sicini
73.06.13	Pattallassang		8	Desa	Borongpa'la'la Je'nemadingga Pacellekang Pallantikang Panaikang Pattallassang Sunggumanai Timbuseng
73.06.08	Somba Opu	14		Kelurahan	Batangkaluku Bonto-Bontoa Bontoramba Kalegowa Katangka Mawang Paccinongang Pandang- Pandang Romangpolong Samata Sungguminasa Tamarumang Tombolo Tompobalang

Kode Kemen dagri	Kecamata n	Jumla h Kelur ahan	Juml ah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurah an
73.06.04	Tinggimoncong	6	1	Desa	Parigi
				Keluraha n	Bonto Lerung Bulutana Gantarang Garassi Malino Pattapang
73.06.03	Tompobulu	2	6	Desa	Bontobuddung Datara Garing Rappoala Rappolemba Tanete
				Keluraha n	Cikoro Malakaji
73.06.10	Tombolo Pao	1	8	Desa	Balassuka Bolaromang Erelembang Kanreapia Mamampang Pao Ta'binjai Tonasa
				Keluraha n	Tamaona
	<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>121</b>		

#### f. Ekonomi

Pertambangan Bahan-bahan galian golongan C di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Jenebarang, seperti pasir, batu kali, dan kerikil secara turun-temuran mampu memberikan nafkah bagi penduduk sekitarnya. Kontribusi sektor ini dalam kegiatan ekonomi tahun 2000 nilainya mencapai Rp. 105,4 miliar atau 9,13 persen, tetapi sumbangannya sektor ini terhadap kas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) cukup signifikan.

Pada tahun anggaran 2001, Pemkab menargetkan Rp. 2,03 miliar dari pajak bahan galian golongan C untuk mengisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan penggalian memang cukup besar karena selain tersedianya material dari DAS, juga ada batu gunung dan tanah liat. Truk-truk lalu-lalang mengangkut material ini di sepanjang jalan protokol yang menghubungkan Kabupaten Gowa dengan Kota Makassar.

Bahan galian memang mampu memberikan pemasukan yang besar bagi kas Pemkab Gowa. Pos pajak ini mendominasi pendapatan hingga mencapai 65 persen dalam PAD tahun anggaran 2001 yang besarnya Rp. 3,11 miliar.

#### g. Pertanian

Potensi Kabupaten Gowa yang sesungguhnya adalah sektor pertanian. Pekerjaan utama penduduk kabupaten yang pada tahun 2000 lalu berpendapatan per kapita Rp. 2,09 juta ini adalah bercocok tanam, dengan sub sektor pertanian tanaman pangan sebagai andalan. Sektor pertanian memberi kontribusi sebesar 45 persen atau senilai Rp. 515,2 miliar. Lahan persawahan yang tidak sampai 20 persen (3,640 hektare) dari total lahan kabupaten mampu memberikan hasil yang

memadai. Dari berbagai produksi tanaman pertanian seperti padi dan palawija, tanaman hortikultura menjadi primadona.

Kecamatan-kecamatan yang berada di dataran tinggi seperti Parangloe, Bungaya dan terutama Tinggi moncong merupakan sentra penghasil sayur-mayur. Sayuran yang paling banyak di budidayakan adalah kentang, kubis, sawi, bawang daun dan buncis. Per tahunnya hasil panen sayur-sayuran melebihi 5.000 ton. Sayuran dari Kabupaten Gowa mampu memenuhi pasar Kota Makassar dan sekitarnya, bahkan sampai ke Pulau Kalimantan dan Maluku melalui Pelabuhan Parepare dan Pelabuhan Mamuju.

Selain bertani sayur yang memiliki masa tanam pendek, petani Gowa juga banyak yang bertani tanaman umur panjang. Salah satunya adalah tanaman markisa (*Fassiforasp*). Mengunjungi Makassar kurang afdal rasanya kalau tidak membawa buah tangan sirup atau juice markisa. Jika kita melihat pemandangan di bandara atau pelabuhan, kebanyakan para calon penumpang yang akan meninggalkan Makassar membawa sari buah beraroma segar ini. Tanaman yang berasal dari daratan Amerika Selatan ini identik dengan Sulawesi Selatan. Desa Kanreapia, Kecamatan Tinggimoncong merupakan salah satu daerah penghasil markisa di Kabupaten Gowa. Sayangnya markisa yang rasa buahnya manis-asam dan mampu menggerakkan industri kecil makanan dan minuman ini kini mulai kurang diminati petani. Menanam markisa memang tidak mudah, kecuali karena masa tanamnya panjang dan memerlukan perawatan khusus, seperti tinggi permukaan tanah, pupuk dan obat-obatan yang cukup mahal.

Selain itu harga markisa juga tidak stabil dan cenderung terus menurun. Tanaman merambat ini memiliki satu masa panen per tahun (November-Januari)

dengan produksi sekitar 300.000 buah per hektar. Jika harga pada masa panen raya, satu kilo (kurang lebih 25 buah) hanya Rp. 500,- sampai Rp. 800, sehingga para petani hanya menerima Rp 6,0 juta sampai Rp 9,6 juta per hektarnya. Keadaan ini yang mendorong luas tanam markisa terus menurun. Pada tahun 1996 terdapat 1.241 hektare dengan produksi 21.861 ton. Empat tahun kemudian luas tanam menjadi 854 hektar dengan produksi 7.189 ton. Petani banyak beralih tanam dari markisa ke sayuran karena lebih pendek masa tanamnya.

## 2. Sejarah Kabupaten Gowa

Dalam khasanah sejarah nasional, nama Gowa sudah tidak asing lagi. Mulai abad ke-15, Kerajaan Gowa merupakan kerajaan maritim yang besar pengaruhnya di perairan Nusantara. Bahkan dari kerajaan ini juga muncul nama pahlawan nasional yang bergelar Ayam Jantan dari Timur, Sultan Hasanuddin, Raja Gowa XVI yang berani melawan VOC Belanda pada tahun-tahun awal kolonialisasinya di Indonesia. Kerajaan Gowa memang akhirnya takluk kepada Belanda lewat Perjanjian Bungaya. Namun meskipun sebagai kerajaan, Gowa tidak lagi berjaya, kerajaan ini mampu memberi warisan terbesarnya, yaitu Pelabuhan Makassar. Pelabuhan yang kemudian berkembang menjadi Kota Makassar ini dapat disebut anak kandungnya, sedangkan Kerajaan Gowa sendiri merupakan cikal bakal Kabupaten Gowa sekarang. Kota Makassar lebih dikenal khalayak dibandingkan dengan Kabupaten Gowa. Padahal kenyataannya sampai sekarang Kabupaten Gowa ibaratnya masih menjadi ibu bagi kota ini. Kabupaten yang hanya berjarak tempuh sekitar 10 menit dari Kota Makassar ini memasok sebagian besar kebutuhan dasar

kehidupan kota. Mulai dari bahan material untuk pembangunan fisik, bahan pangan, terutama sayur-mayur, sampai aliran air bersih dari Waduk Bili-bili.

Kemampuan Kabupaten Gowa menyuplai kebutuhan bagi daerah sekitarnya dikarenakan keadaan alamnya. Kabupaten seluas 1.883,32 kilometer persegi ini memiliki enam gunung, di mana yang tertinggi adalah Gunung Bawakaraeng. Daerah ini juga dilalui Sungai Jeneberang yang di daerah pertemuannya dengan Sungai Jenelata dibangun Waduk Bili-bili. Keuntungan alam ini menjadikan tanah Gowa kaya akan bahan galian, di samping tanahnya subur.

### 3. Letak Geografis Kelurahan Tamarunang



**Struktur Organisasi Kelurahan Tamarunang Kec. Somba Opu Kabupaten**

**Gowa**

**Gambar 4.1**

Tamarunang adalah Kelurahan di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi selatan, Indonesia. Tamarunang terletak 3 km dari ibu kota kabupaten dan memiliki luas 3,33 Ha/Km dan kelurahan tamarunang terbagi dari dua lingkungan yaitu lingkungan Beroanging dan lingkungan Panggentungan. Kelurahan Tamarunang terdiri dari 14 Rw dan 75 Rt.

Kondisi geografis Kelurahan Tamarunang memiliki ketinggian 5-6 m dari permukaan laut, curah hujan rata-rata 2.562 mm pertahun dan keadaan suhu rata-rata 32° Topografi atau bentang lahan, datar 333 Ha dan berbukit 5 Ha. Batas-batas wilayah kelurahan tamarunang sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kelurahan RomangPolong
2. Sebelah Barat : Kelurahan Batangkaluku
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Palangga
4. Sebelah Timur : Kelurahan Mawang

## **2. Kondisi Monografi**

### **a. Keadaan Penduduk**

Secara kuantitatif penduduk Kelurahan Tamarunang berjumlah 15.583 jiwa/orang. Jumlah tersebut terbagi menjadi 3.696 kepala keluarga/KK.

**Tabel4.3**

### **Jumlah penduduk menurut jenis kelamin Kelurahan Tamarunang**

Menurut jenisnya	Jumlahnya
Penduduk dengan jenis kelamin laki-laki	7.938 jiwa
Penduduk dengan jenis kelamin perempuan	7.594 jiwa

### **b. Pendidikan**

Untuk mengetahui keadaan pendidikan penduduk Kelurahan Tamarunang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4**

### **Penduduk Menurut Pendidikan Kelurahan Tamarunang**

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Buta Huruf	110
2	Masih Sekolah	3.196

3	Tidak Tamat SD	752
4	Tamat Sd	1.104
5	Tamat SLPT	2.054
6	Tamat SLTA	3.832
7	D2	19
8	D3	60
9	S1	879
10	S2	219
11	S3	2
12	Tidak Sekolah	1.988
Jumlah		14.212

Berdasarkan tabel IV dapat di lihat bahwa warga telah mulai meningkatkan kesadaran akan pendidikan pada kelurahan tamarunang sehingga dapat di lihat lulusan SD, SMP dan SMA menempati urutan pertama, kedua dan ketiga. Untuk mengetahui sarana pendidikan yang ada di kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.5**  
**Sarana Pendidikan Kelurahan Tamarunang**

No.	Jenis lembaga pendidikan	Frekuensi	Guru	Murid
1	Taman kanak-kanak (TK)	9	33	314
2	SD	3	50	1.512
Jumlah		12	83	1.826

Sarana pendidikan di Kelurahan Tamarunang dapat di bilang tidak cukup, karena di kelurahan yang penduduknya 15.583 jiwa belum mempunyai sarana pendidikan SMP dan SMA.

c. Agama

Untuk mengetahui jumlah penduduk menurut agama di Kelurahan Tamarunang dapat di lihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.6**

**Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama**

No.	Penduduk yang beragama	Jumlah
1	Islam	13.081 orang
2	Kristen	62 orang
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
Jumlah		13.143 orang

Kehidupan keagamaan masyarakat Kelurahan Tamarunang adalah mayoritas umat muslim, hal ini di tunjukkan pada tabel IV bahwa jumlah penduduk muslim lebih banyak dari agama lain. Muslim sendiri dalam lingkungan ini memiliki perkembangan yang cukup luas. Banyak dari aliran-aliran muslim itu sendiri, diantaranya adanya aliran Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU), Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Aliran-aliran ini juga mempengaruhi kerangka pikir masyarakat dalam melestarikan budaya dan tradisi warisan leluhur. Masyarakat NU menjadi masyarakat muslim dominan di Kelurahan Tamarunang dan masyarakat inilah

yang masih dan terus melestarikan budaya leluhur, untuk masyarakat aliran Muhammadiyah sudah tidak percaya dengan hal-hal ini karena di anggap bid'ah. Kelurahan Tamarunang terdiri dari 17 masjid dan 3 mushollah.

## **B. Hasil Penelitian**

Penelitian ini akan mendeskripsikan Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Guna Mengatasi Permasalahan Sampah di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa. Sebagaimana telah dibentuk beberapa peraturan oleh pemerintah kabupaten gowa yaitu peraturan daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2017 tentang kebersihan. Kemudian Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 44 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) dan Surat Edaran Bupati Gowa Nomor 188 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah. Untuk pengelelaan sampah memiliki 28 mobil yang dikhususkan di wilayah Kecamatan Somba Opu dan Pallangga, 121 truk sampah di desa di Kabupaten Gowa, 105 motor sampah di kelurahan, 3 kontainer, 1 TPA, 32/2 TPS, 46 bank sampah dan 1 induk Bank Sampah dan 1 TPS 3R.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa yaitu Walaupun sudah terdapat beberapa sarana prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Gowa (Pemkab) gowa untuk setiap Kelurahan, namun penanganan sampah ini tetap butuh keterlibatan semua pihak termasuk komunitas pemerhati lingkungan dan masyarakat. Apalagi salah satu permasalahan yang ditangani bersama adalah masih ada masyarakat yang kadang sering membuang sampah sembarang yang edukasi sehingga disinilah diperlukan

adanya peran Pemerintah Kelurahan Tamarunang Khususnya dalam memberdayakan masyarakatnya guna mengatasi permasalahan sampah.

Berdasarkan hasil penelitian untuk mengaitkan dengan teori yang digunakan, adapun menurut Muhadam Labolo (2010) peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa indikator adalah sebagai berikut:

### **1. Pemerintah Sebagai Regulator**

Peran Pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Pemerintah sebagai Pembuat dan Pengatur penerbitan Peraturan-peraturan, atau pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Peran Pemerintah dalam hal pengembangan pemberdayaan kelompok masyarakat sangatlah penting karena pemerintahlah yang memberikan fasilitas yang dimiliki suatu daerah dapat berkembang.

Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 menyatakan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, disamping itu untuk terciptanya kondisi lingkungan yang bersih maka pemerintah maupun masyarakat agar senantiasa menjaga kondisi lingkungan sekitar sehingga tata kelola masyarakat akan baik dan bisa menjadi acuan kepada daerah lain sebagai daerah percontohan dalam tata kelola persampahan khususnya di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa. Kutipan Wawancara yang dilakukan bersama Bapak Lurah Kelurahan

Tamarunang H. Mulhtar Niara, S.Sos. M.Adm. KP Kabupaten Gowa terkait peran pemerintah sebagai regulator dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan sampah di kelurahan Tamarunang dalam wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Pemerintah dalam hal ini terkait masalah sampah sudah berupaya semaksimal mungkin terkhusus sendiri untuk Kelurahan Tamarunang perannya itu kita sudah menyebarkan informasi-informasi baik itu lewat pengumuman masjid ke masjid, forum, maupun secara struktur organisasi pemerintah melalui Rukun warga (Rw) ke Rukun tetangga (Rt) sampai jajarannya ke bawah. Apalagi dalam hal ini pemerintah Kelurahan Tamarunang khususnya telah melakukan pencanangan dalam hal sabtu bersih, dimana setiap hari sabtu atau minggu masyarakat Kelurahan Tamarunang wajib melakukan kegiatan kerja bakti di setiap wilayah tempat tinggal masyarakat masing-masing.”(Wawancara 13 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran Pemerintah sebagai regulator di Kelurahan Tamarunang dalam hal mengatasi permasalahan sampah yaitu pemerintah mengeluarkan semacam aturan bahwa setiap hari sabtu atau minggu khususnya masyarakat diwajibkan untuk melakukan kegiatan kerja bakti yang diberi nama sabtu bersih. Selain itu Pemerintah Kelurahan Tamarunang dalam hal menanggulangi masalah sampah telah berupaya semaksimal mungkin dengan cara menyebarkan infomasi-infomasi melalui forum, pengumuman masjid ke masjid agar masyarakat selalu memperhatikan kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Lebih lanjut disampaikan oleh Ibu Reslina S.Ses Kasi Pengembangan dan Perberdayaan Masyarakat (Penpelmas) terkait peran pemerintah sebagai

regulator dalam hal pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah sampah adalah sebagai berikut:

“Di Kelurahan Tamarunang itu sendiri terdiri dari 14 Rw dan 75 Rt. dalam hal ini yang dilakukan pemerintah kelurahan terkait perannya sebagai regulator yaitu Pemerintah Kelurahan Tamarunang membuat semacam peringatan (papan bicara) atau informasi dengan cara memasang papan bicara di beberapa titik pembuangan sampah yang bertujuan untuk mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan”.(Wawancara 13 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran Pemerintah sebagai regulator di Kelurahan Tamarunang dalam hal mengatasi permasalahan sampah yaitu Pemerintah Kelurahan Membuat semacam peringatan (papan bicara) yang dipasang di beberapa titik pembuangan sampah yang bertujuan untuk mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, maka dapat disimpulkan peran Pemerintah sebagai regulator sangatlah penting, karena Pemerintah yang berperan sebagai pengatur atau pembuat dan yang menerbitkan peraturan-peraturan. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah sebagai regulator di Kelurahan Tamarunang sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik karena Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dan untuk menyeimbangkan penyelenggaran pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan seperti pemerintah Kelurahan Tamarunang khususnya telah melakukan pencanangan dalam hal sabtu bersih, dimana setiap hari sabtu atau minggu masyarakat Kelurahan Tamarunang wajib melakukan kegiatan kerja bakti di

setiap wilayah tempat tinggal masyarakat masing-masing. Selain itu Pemerintah Kelurahan Membuat semacam peringatan (papan bicara) yang dipasang di beberapa titik pembuangan sampah yang bertujuan untuk mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.

## 2. Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah berkaitan dengan peran Pemerintah sebagai penggerak atau berperan melalui pemberian bimbingan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan. Pemerintah sebagai Penggerak, atau berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif.

Pembinaan dan pengarahan ini sangat penting hal ini diperlukan untuk memelihara dinamika badan tertentu yang dapat memberikan pembinaan kepada masyarakat. Adapun kutipan wawancara yang dilakukan bersama Ibu Sekretaris Lurah Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa mengenai peran Pemerintah sebagai Dinamisator adalah sebagai berikut:

“Pembentukan Bank sampah memang sangatlah penting dimana perlu pembinaan terhadap masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dalam menyelenggarakan tentang daur ulang sampah sehingga bernilai ekonomi.” (Wawancara 14 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembentukan bank sampah adalah sangat penting sebagai wujud peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu dengan memberikan bimbingan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang sadar akan lingkungan bersih untuk melihat serta

menjadikan sampah sebagai barang yang dapat memberikan nilai ekonomi jika dikelola dengan baik.

Lebih lanjut disampaikan oleh Bapak Suhardi selaku Ketua Rt 1 Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa terkait peran Pemerintah Sebagai Dinamisator adalah sebagai berikut:

“Di Kelurahan Tamarunang itu sendiri masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pemanfaatan bank sampah yang telah dibentuk oleh pemerintah dengan menganggap bahwa proses yang harus dilakukan itu rumit dalam memenuhi kebutuhan pengguna ulang, mendaur dan penggunaan akhir”. (Wawancara 14 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat di kelurahan Tamarunang bahwa sampah sebenarnya mempunyai manfaat dan memiliki nilai ekonomi.

Adapun hasil wawancara dengan salah satu pengurus Bank Sampah Al Mutsyar Kelurahan Tamarunang Ibu Suriati Dg Kanang terkait peran Pemerintah sebagai Dinamisator adalah sebagai berikut:

“Di Bank Sampah Al Mutsyar Kelurahan Tamarunang itu sendiri ada beberapa jenis-jenis kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Tamarunang dengan melibatkan masyarakat antara lain masyarakat dilibatkan di berbagai kegiatan penyuluhan dan pelatihan seperti pembuatan bunga dari sampah plastik bekas, hiasan dinding dan lain sebagainya. Selain kegiatan pelatihan Pemerintah juga melibatkan masyarakat diberbagai penyuluhan tentang bahaya yang ditimbulkan dari sampah jika tidak dikelola dengan baik”. (Wawancara 14 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Bank Sampah yang telah didirikan atau dibentuk oleh Pemerintah kelurahan Tamarunang juga melakukan beberapa jenis-jenis kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Tamarunang dengan melibatkan masyarakat

antara lain masyarakat dilibatkan di berbagai kegiatan penyuluhan dan pelatihan seperti pembuatan bunga dari sampah plastik bekas, hiasan dinding dan lain sebagainya. Selain kegiatan pelatihan Pemerintah juga melibatkan masyarakat diberbagai penyuluhan tentang bahaya yang ditimbulkan dari sampah jika tidak dikelola dengan baik

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah sebagai dinamisator di Kelurahan Tamarunang sudah berjalan dengan baik dilihat dari peran Pemerintah dalam hal pemberian bimbingan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Dimulai dari pendirian Bank Sampah Al Mufsyar, dan memberikan atau melibatkan masyarakat di berbagai kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang dapat menambah pengetahuan masyarakat itu sendiri untuk memanfaatkan sampah sebagai suatu yang mempunyai nilai apabila dikelola dengan baik. Pemberian pendidikan sangatlah berperan penting bagi masyarakat. Karena dengan memberikan bantuan kepada masyarakat saat terjadi kendala itu sangat memudahkan masyarakat, dan masyarakat merasa mendapatkan perhatikan dan kedulian dari pemerintah itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai dinamisator sangat bermanfaat bagi masyarakat selain membantu masyarakat saat terjadi kesulitan, juga membantu dalam proses pembangunan daerah.

### 3. Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran Pemerintah sebagai Fasilitator yaitu Pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah).

Pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana, menyediaakan modal bagi masyarakat.

Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan/permodalan. Adapun kutipan wawancara dengan Bapak Lurah Kelurahan Tamarunang H. Mukhtar Ninra S.Sos., M.Adm. KP mengenai peran Pemerintah sebagai fasilitator adalah sebagai berikut:

“Bericara masalah penyediaan lahan Pemerintah kelurahan masih sangat kurang dana disebabkan masih terbatasnya dana untuk penyediaan lahan di setiap rt/rw. (Wawancara 15 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa lahan yang disediakan pemerintah di setiap rt/rw masih kurang disebabkan masalah dana yang masih kurang.

Lebih lanjut disampaikan oleh Ibu Sekretaris Lurah Kelurahan Tamarunang Ibu Wahyuni Wahab S.E terkait peran Pemerintah sebagai Fasilitator adalah sebagai berikut:

“Pemerintah Kelurahan menyediakan beberapa fasilitas dal hal ini beberapa armada tempat pembuangan sampah seperti motor sampah atau truk pengangkut sampah di beberapa titik lokasi. Pemerintah Kelurahan membebaskan Bagi masyarakat yang ingin berlangganan di salah satu armada yang telah disediakan terebut. Truk pengangkut sampah atau motor sampah itu sendiri ada yang merupakan sumbangsi dari beberapa pihak seperti, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Partai Politik dan Karang Taruna” (Wawancara 15 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah Kelurahan Tamarunang menyediakan beberapa fasilitas motor sampah yang tersedia di beberapa titik lokasi. Fasilitas motor sampah tersebut ada yang

merupakan sumbangsi dari beberapa pihak seperti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Partai Politik, dan Karang Taruna.

Lebih lanjut disampaikan oleh satu satunya masyarakat Dg Erang mengenai peran Pemerintah sebagai Fasilitator adalah sebagai berikut:

“Walaupun Pemerintah telah menyediakan Lahan tetapi, lahan yang sudah tersedia tersebut masih belum memadai di setiap wilayah dalam mengumpulkan sampah apalagi dalam hal ini armada atau truk pengangkut sampah atau motor sampah mempunyai jadwal khusus untuk mengangkut sampah. Jadi apabila semua masyarakat di masing-masing wilayahnya datang untuk mengumpulkan sampah lahan yang disediakan tersebut masih kurang. Jadi pemerintah baiknya lebih memperhatikan hal ini”.(Wawancara 15 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa lahan yang sudah disediakan oleh pemerintah apabila semua masyarakat datang untuk membuang sampah tidak memadai. Masyarakat berharap pemerintah baiknya lebih memperhatikan hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah sebagai fasilitator di Kelurahan Tamarunang belum berjalan dengan baik walaupun pemerintah telah menyediakan beberapa fasilitas atau sarana dan prasarana tetapi hal tersebut dinilai masih sangat kurang apalagi dalam hal ini Kelurahan Tamarunang merupakan salah satu Kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Somba Opu. Dalam hal ini peran Pemerintah sebagai fasilitator sangatlah penting bagi masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan penyediaan lahan atau pemberian dana kepada masyarakat untuk menambah fasilitas penyediaan tempat sampah. Karena terkait peran Pemerintah sebagai fasilitator sudah semestinya Pemerintah yang berperan lebih untuk memenuhi kebutuhan tersebut serta membantu masyarakat dalam hal

pendanaan atau permodalan dalam proses pemberdayaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah sebagai fasilitator sangat diperlukan karena memang perlu adanya pemberian modal kepada masyarakat untuk menuju pemberdayaan.

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

#### 1. Pemerintah Sebagai Regulator

Peran Pemerintah sebagai Regulator adalah Pemerintah sebagai Pembuat dan Pengatur penerbitan Peraturan-peraturan, atau pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Peran Pemerintah sebagai Regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai Regulator, Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 menyatakan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, disamping itu untuk terciptanya kondisi lingkungan yang bersih maka pemerintah maupun masyarakat agar senantiasa menjaga kondisi lingkungan sekitar sehingga tata kelola masyarakat akan baik dan bisa menjadi acuan kepada daerah lain sebagai daerah percontohan dalam tata kelola persampahan.

Adapun bentuk peran Pemerintah sebagai Regulator di Kelurahan Tamarunang dalam menerbitkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan

pengelolaan sampah di kelurahan Tamarunang Dalam penelitian ini peran Pemerintah sebagai Regulator untuk masyarakat sudah terpenuhi dengan Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dan untuk menyeimbangkan penyelenggaran pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan seperti pemerintah Kelurahan Tamarunang khususnya telah melakukan pencanangan dalam hal sabtu bersih, dimana setiap hari sabtu atau minggu masyarakat Kelurahan Tamarunang wajib melakukan kegiatan kerja bakti di setiap wilayah tempat tinggal masyarakat masing-masing. Selain itu Pemerintah Kelurahan Membuat semacam peringatan (papan bicara) yang dipasang di beberapa titik pembuangan sampah yang bertujuan untuk mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.

Peran Pemerintah Sebagai Regulator dalam program pemberdayaan adalah penyuluhan dari Lurah dan jajaran pemerintah setempat Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa kepada masyarakat yaitu dengan memberikan motivasi untuk menjaga kebersihan lingkungan dan pengolahan sampah.

Berdasarkan data sekunder penulis dapatkan pemerintah Kelurahan Tamarunang sebagai regulator sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi sampah dengan membuat aturan agar masyarakat bisa sadar untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat.

## 2. Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah berkaitan dengan peran Pemerintah sebagai penggerak atau berperan melalui pemberian bimbingan secara

intensif dan efektif kepada masyarakat. Pemerintah sebagai Penggerak, atau berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif.

Dalam penelitian ini peran Pemerintah sebagai Dinamisator sudah terpenuhi dengan adanya pembentukan Bank Sampah serta pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah atau daur ulang sampah sehingga hal tersebut dapat bernilai ekonomi.

Peran Pemerintah dalam hal pemberian bimbingan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Dimulai dari pendirian Bank Sampah Al Mutsyar, dan memberikan atau melibatkan masyarakat di berbagai kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang dapat menambah pengetahuan masyarakat itu sendiri untuk memanfaatkan sampah sebagai suatu yang mempunyai nilai apabila dikelola dengan baik. Pemberian pendidikan sangatlah berperan penting bagi masyarakat. Karena dengan memberikan bantuan kepada masyarakat saat terjadi kendala itu sangat memudahkan masyarakat, dan masyarakat merasa mendapatkan perhatikan dan kepedulian dari pemerintah itu sendiri.

Selain itu partisipasi pemerintah untuk mengarahkan sekelompok masyarakat bisa dikatakan sudah berjalan dengan semestinya dilihat bahwa pemerintah sudah menciptakan berbagai pelatihan khusus untuk masyarakat khususnya ibu-ibu pengelola sampah untuk memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang berguna.

Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator dalam program pemberdayaan adalah dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada kelompok masyarakat

untuk mengelola sampah menjadi hiasan dinding ataupun pembuatan pot dari sampah plastik yang telah didaur ulang selain itu berupa pelatihan pengolahan sampah menjadi pupuk.

Peran pemerintah kelurahan Tamarunang sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah kelurahan berperan melalui pemberian pembinaan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Pembinaan dan pengarahan ini sangat penting bagi pemberdayaan masyarakat, hal ini diperlukan untuk memelihara dinamika badan tertentu yang dapat memberikan pembinaan kepada masyarakat kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa.

Pembinaan ini dilakukan kepada kelompok-kelompok misalnya seperti kelompok Bank Sampah Al-Mutsyar, Misalnya seperti pembinaan untuk membuat pot bunga dari botol sampah yang sudah tidak terpakai lagi dan pembuatan hiasan seperti bunga-bunga yang terbuat dari plastik tempat minuman bekas, pembuatan hiasan dinding. Dengan adanya pembinaan tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa bisa membantu meningkatkan sedikit kreativitas masyarakat dan perekonomian masyarakat apabila mengelola sampah dengan baik.

### 3. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran Pemerintah sebagai Fasilitator yaitu Pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah).

Pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana, menyediaakan modal bagi masyarakat.

Sebagai Fasilitator, Pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan/permodalan.

Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator dalam program pemberdayaan adalah berupa bantuan dalam pengolahan sampah yakni pemerintah menyediakan motor sampah yang tersedia di beberapa titik lokasi atau gerobak sampah yang mendukung usaha warga dalam mengolah sampah organik.

Peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas berdasarkan sumber data primer yang penulis dapatkan Pemerintah sebagai fasilitator di Kelurahan Tamarunang belum berjalan dengan baik walaupun pemerintah telah menyediakan beberapa fasilitas atau sarana dan prasarana tetapi hal tersebut dinilai masih sangat kurang apalagi dalam hal ini Kelurahan Tamarunang merupakan salah satu Kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Somba Opu. Dalam hal ini peran Pemerintah sebagai fasilitator sangatlah penting bagi masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan penyediaan lahan atau pemberian dana kepada masyarakat untuk menambah fasilitas penyediaan tempat sampah. Karena terkait peran Pemerintah sebagai fasilitator sudah semestinya Pemerintah yang berperan lebih untuk memenuhi kebutuhan tersebut serta membantu masyarakat dalam hal pendanaan atau permodalan dalam proses pemberdayaan. Jadi dapat disimpulkan

bahwa peran Pemerintah sebagai fasilitator sangat diperlukan karena memang perlu adanya pemberian modal kepada masyarakat untuk menuju pemberdayaan.

Mengenai peran pemerintah sebagai Fasilitator ini penulis mendapatkan informasi dari informan yang menyatakan bahwa masih kurangnya lahan atau tempat pembuangan sampah bagi masyarakat Kelurahan Tamarunang yang disediakan oleh pemerintah di setiap wilayahnya sehingga masih banyak terdapat sampah yang berserakan.



## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya maka kesimpulannya ialah sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

Maka sesuai dengan perumusan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Peran pemerintah sebagai Regulator, adapun bentuk peran Pemerintah sebagai Regulator di Kelurahan Tamarunang dalam menerbitkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di kelurahan Tamarunang dalam penelitian ini Peran Pemerintah sebagai Regulator dalam Pemberdayaan Masyarakat sudah dikatakan terpenuhi dengan Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dan untuk menyeimbangkan penyelenggaran pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan seperti pemerintah Kelurahan Tamarunang khususnya telah melakukan pencanangan dalam hal sabtu bersih, dimana setiap hari sabtu atau minggu masyarakat Kelurahan Tamarunang wajib melakukan kegiatan kerja bakti di setiap wilayah tempat tinggal masyarakat masing-masing. Selain itu Pemerintah Kelurahan Membuat semacam peringatan (papan bicara) yang dipasang di beberapa titik pembuangan sampah yang bertujuan untuk mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.

- b. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator adalah berkaitan dengan peran Pemerintah sebagai penggerak atau berperan melalui pemberian bimbingan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Dalam penelitian ini peran Pemerintah sebagai Dinamisator sudah terpenuhi dengan adanya pembentukan Bank Sampah Peran Pemerintah dalam hal pemberian bimbingan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Dimulai dari pendirian Bank Sampah Al Mutsyar, dan memberikan atau melibatkan masyarakat di berbagai kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang dapat menambah pengetahuan masyarakat itu sendiri untuk memanfaatkan sampah sebagai suatu yang mempunyai nilai apabila dikelola dengan baik. Pemberian pendidikan sangatlah berperan penting bagi masyarakat. Karena dengan memberikan bantuan kepada masyarakat saat terjadi kendala itu sangat memudahkan masyarakat, dan masyarakat merasa mendapatkan perhatikan dan kepedulian dari pemerintah itu sendiri.
- c. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan/permodalan. Peran pemerintah peran Pemerintah sebagai fasilitator di Kelurahan Tamarunang dapat dikatakan belum berjalan dengan baik walaupun pemerintah telah menyediakan beberapa fasilitas atau sarana dan prasarana tetapi hal tersebut dinilai masih sangat kurang apalagi dalam hal ini Kelurahan Tamarunang merupakan salah satu Kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Somba Opu. Dalam hal ini peran Pemerintah sebagai fasilitator sangatlah penting bagi masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan penyediaan

lahan atau pemberian dana kepada masyarakat untuk menambah fasilitas penyediaan tempat sampah. Karena terkait peran Pemerintah sebagai fasilitator sudah semestinya Pemerintah yang berperan lebih untuk memenuhi kebutuhan tersebut serta membantu masyarakat dalam hal pendanaan atau permodalan dalam proses pemberdayaan

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka yang menjadi bahan masukan untuk pemerintah dan Masyarakat Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa antara lain:

- a. Melihat peran Pemerintah kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa dalam pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik, maka pemerintah kelurahan Tamarunang harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Disamping itu perlu juga diadakan pelatihan, bimbingan secara intensif kepada masyarakat yang kurang mengerti dampak yang ditimbulkan oleh sampah apabila tidak dikelola dengan baik.
- b. Untuk sebagian masyarakat yang masih sering membuang sampah sembarangan dan tidak mematuhi peraturan pemerintah untuk sedikit memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal karna lingkungan yang kumuh bisa mendatangkan berbagai penyakit dan mengurangi nilai keindahan lingkungan tersebut.

- c. Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis ini dapat menjadi manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan terkait dengan ilmu administrasi negara dan agar kedepannya agar disempurnakan dengan peneliti-peneliti selanjutnya sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rivai. (2019). “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Cangkir Hijau Kelurahan IringMulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.*” 2019.
- Anon. n.d. *Perda-Nomor-01-Tahun-2018-Tentang-Penyelenggaraan-Kabupaten-Sehat.Pdf.*
- ASTUTI, D. P. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera Di Kota Makassar. *γΝΣΤ, 8.5.2017*, 2003–2005.
- Dobiki, Joflius. (2018). “Analisis Ketersedian Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara.” *Jurnal Spasial Volume 5(2):220–28.*
- Ferdiansyah, M. E., &Arsiyah, A. (2014). “Peran Pemerintah Dan Kader Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengolahan Sampah.” *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik) 2(2):191–204.* doi: 10.21070/jkmp.v2i2.438.
- Harmanto, H. S. (2020). “Kajian Sistem Pengelolaan Sampah Kementrian Lingkungan Hidup 2007.” 8–24.
- Hijrah, nurul. (2021). “Pemkab Gowa Siap Bersinergi Tangani Sampah Di Kawasan Mamminasata.”
- Husnawati, S. (2016).Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Sampah Di Kota Makassar.*Program Studi Ilmu PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK, 1-67.*
- Idayanti. (2017). “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SIARAN TVRI SUL-SEL (Survei Masyarakat Gowa) Profil Kelurahan Tamarunang.”
- Ii, B. A. B., and A. Peran. 2015. “Organization and Management.” *Handbook of Educational Ideas and Practices* 377–518. doi: 10.4324/9781315717463-14.
- Merton (2007) Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kabupaten Magetan. *Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689-1699.*
- Peran menurut merton 2007. (2007).

- Miftahul, Khairi. (2021). "Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Daur Ulang Sampah :Studi Pada Komunitas Bank Sampah Bangkitku Kelurahan Pall Lima Kecamatan Kota Baru Kota Jambi." 6.
- Muchsin, T., & Saliro, S. S.(2020). "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 5(2):72. doi: 10.22373/justisia.v5i2.8455.
- Muhadам Labolo. (2016). "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah Di Kota Makassar." *Pogram Studi Ilmu PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK* 1–67.
- Muhammad, Ilyas. Buku Evaluasi Pembelajaran, Konsep Dasar, Prinsip, Teknik, dan Prosedur. 256 (2020).
- Pemerintah, Pusat. (2008). "Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah" 1–46.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (2008). Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). *Handbook of Pediatric Retinal OCT and the Eye-Brain Connection* 285-287 (2019) doi:10.1016/B978-0-323-60984-5.00062-7.
- Puastiningsih, Sri. 2017. "Ir-Perpustakaan Universitas Airlangga." *Ir-Perpustakaan Universitas AIRLANGGA* (2014):12–31.
- Qodriyatun, S. N. (2014). "Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* (18):21–34.
- "Sejarah Kabupaten Gowa Kecamatan Somba Opu."
- Setiyawan. 2013. "Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kabupaten Magetan." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.
- Sulastiyani (2004). Pemberdayaan Masyarakat Untuk Memajukan Desa Wisata Pentingsari Kecamatan Cangkringan Kabupaten Slamen Daerah Istimewa Yogyakarta. *Lumbung Pustaka Univ. Negeri Yogyakarta* 11-38 (2018).
- Soetomo. (2015). "PROGRAM PEMBANGUNAN DESA PENGERTIAN MASYARAKAT." 6(3):46–52.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Wahyudi, R. (2011). *Hubungan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dengan Perbaikan Lingkungan.*

Z, Zubaedi. (2013). *Buku Pengembangan Masyarakat.* 12-31.



**LAMPIRAN**

- 1. Wawancara dengan Bapak Lurah Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa ( H. MukhtarNinraS.Sos. M.Adm., KP)**



- 2.Wawancara dengan Ibu RoslinaS.Sos Kasi Pengembangan dan Permberdayaan Masyarakat (Penpelmas)**





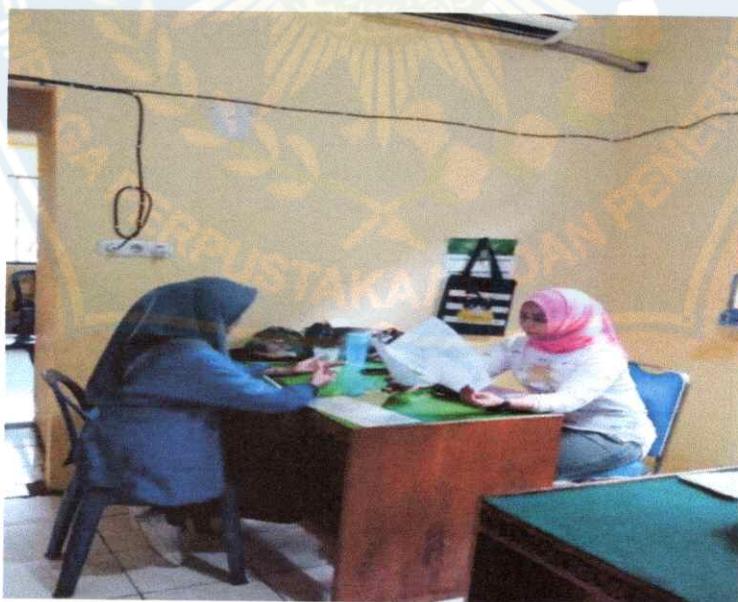
### 3. Wawancara dengan Ketua Rt 1 Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa (Bapak Suhardi)



**4. Wawancara dengan Pengurus Bank Sampah Al Mutsyar (Ibu Suriati Dg Kanang)**



**5. Wawancara dengan Ibu Sekretaris Lurah Kelurahan Tamarunang  
(Ibu Wahyuni Wahab S.E)**

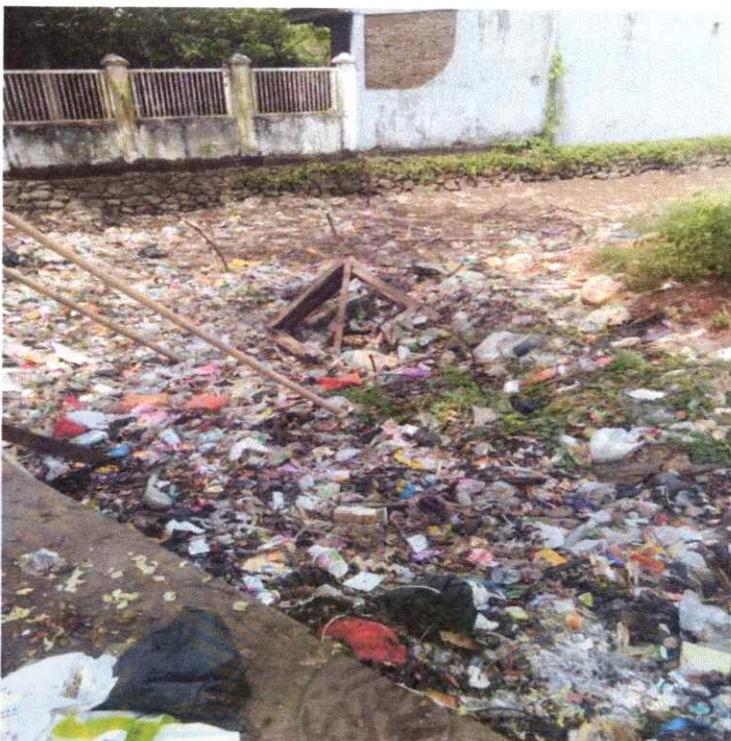


**6. Wawancara dengan salah satu Masyarakat Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa**



**7. Beberapa Dokumentasi Tempat Pembuangan sampah yang terdapat di Tamarunang 2**



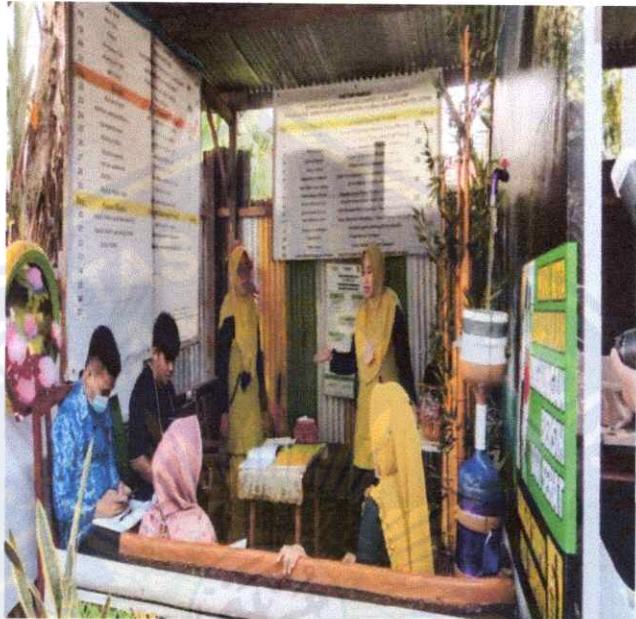


**8. Beberapa Dokumentasi di Bank Sampah Al Mutsyar(Foto Sampah yang dibawa masyarakat ke bank sampah)**

Penimbangan Sampah Di Bank Sampah Al Mutsyar



Beberapa pengurus bank sampah Al- Mutsyar



Contoh sampah milik warga yang dibawa ke bank sampah Al-Mutsyar  
untuk dijual



## Daftar Harga Penjualan Sampah Di Bank Sampah Al-Mutasyar

DAFTAR HARGA PENJUALAN SAMPAH KABUPATEN GOWA		
No.	Contoh Barang / Produk	Rp/Kg
1	Gelas Bening Bersih	
2	Gelas Bening Kotor	
3	Gelas Warna	
4	Gelas Campur	
5	Cincin Gelas	
6	Botol Bening Bersih	
7	Botol Biru Muda Bersih	
8	Botol Campur Bersih	
9	Botol Campur Kotor	
10	Botol Warna Bersih	
11	Botol Warna Kotor	
12	Plastik Pecah Belah	
13	Tutup Botol	
14	Tutup Galon	
15	Botol Plastik Bergaris Tengah	
Logam		
16	Besi Tebal	
17	Besi Tipis	
18	Kaleng	
19	Aluminium Tipis	
20	Aluminium Tebal	
21	Besi Seng	
Kertas		
22	Kertas Putih	
23	Kertas Campur/Warna	
24	Kertas Buram	
25	Kardus (Doz) A	
26	Kardus (Doz) B	
27	Kardus Warna	
28	Koran	
29	Karton Rak Telur	
Kaca / Botol		
30	Botol leher Pendek Bening	
31	Botol Leher Panjang Tehaf	
32	Botol Tebal	
Contoh Barang / Produk		
Rp/Kg		
	Gelas Plastik Warna Bening - Tanpa penutup	6.000
	Gelas Plastik Warna Bening - Masih Ada penutup	3.000
	Ale-Ale, Mountex, Teh Gelas - Dicusun	2.500
	Segala Jenis Gelas Plastik - Campur	2.000
	Cincin atau Potongan Bibir Gelas	2.000
	Botol Ades,coracola,fanta,floridina - tanpa tutup dan label	4.200
	Botol Aqua, JS, Club,Dan Le Mineral	3.500
	Segala Jenis botol Tanpa label dan penutup	2.300
	Segala Jenis botol Ada label dan penutup	2.000
	Botol Minuman warna hijau/biru - Tanpa penutup dan label	2.500
	Botol minuman biru/hijau - Tanpa penutup dan label	2.000
	Baskom, Gelas, Piring, Kursi plastik (Tanpa Damar)	2.200
	Tutup Botol campur	2.500
	Tutup Galon warna campur	4.000
	Botol hergaris tengah (botol bedak,botol oli,dsb)	2.200
	Contoh Barang / Produk	
	Rp/Kg	
	Besi Cor, Besi Plat	3.200
	Drum, Rak Piring	2.800
	Kaleng Makanau, Kaleng Susu - Tidak dipress	1.200
	Kaleng Minuman, Fanta, Sprite	7.800
	Panci, Wajan, Dan Mesin Motor	9.000
	Seng Bekas	1.200
Contoh Barang / Produk		
Rp/Kg		
	Buku Tulis, Kertas Fotocopy	2.500
	Majalah, Karton Warna	800
	Kertas Warna Buram	
	Karton Coklat Box	1.000
	Karton Coklat Box Kondisi Lembab dan sobek	2.800
	Karton Box Buah	2.000
	Koran Berita	1.500
	Rak untuk Susan Telur	700
Contoh Barang / Produk		
Rp/Kg		
	Botol Markisa/Bensin	1.000
	Botol Kecap Dan Sejenisnya	500
	Botol Soda Dan Sejenisnya	300

Dikeluarkan di : Sungguminasa

Pada Tanggal : 08 Maret 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS**

**AZHARI AZIS, AP, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c

NIP : 197507131994121001

### Tembusan :

1. Pengelola Bank Sampah Unit
2. Arsip

### Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 *Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSeE.
- Surat ini dapat dibuktikan keaslinya dengan melakukan scan pada QR Code





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.suselprov.go.id> Email : [ptsp@suselprov.go.id](mailto:ptsp@suselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor	: 3388/S.01/PTSP/2022	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	<u>Izin penelitian</u>	

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2142/05/C.4-VIII/VI/40/2022 tanggal 16 Juni 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: A. VIFI ANDRIANI
Nomor Pokok	: 105611120918
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GUNA MENGATASI  
PERMASALAHAN SAMPAH DI KELURAHAN TAMARUNANG KAB. GOWA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 20 Juni s/d 20 Agustus 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 17 Juni 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA  
Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 20 Juni 2022

**Kepada Yth.**

Nomor : 503/698/DPM-PTSP/PENELITIAN/VI/2022  
 Lamp :  
 Perihal : **Rekomendasi Penelitian** Lurah Tamaturang Kec. Somba Opu Kab. Gowa  
di-  
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 3388/S.01/PTSP/2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: <b>A. VIFI ANDRIANI</b>
Tempat/Tanggal Lahir	: Sanrego / 13 Maret 2000
Nomor Pokok	: 105611120918
Jenis Kelamin	: Perempuan
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan Lembaga	: Mahasiswa(SI)
Alamat	: Kafe Desa Sanrego

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis Disertasi Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**"PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GUNA MENGATASI PERMASALAHAN SAMPAH DI KELURAHAN TAMARUNANG KAB. GOWA"**"

Selama : 20 Juni 2022 s.d 20 Agustus 2022  
 Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. **Penelitian/Pengambilan Data** tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mintaat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
 a.n. **BUPATI GOWA**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si**  
 Pangkat : Pembina Utama Muda  
 Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua LP3M UNISMU Makassar di Makassar.
3. Yang bersangkutan;
4. Pertanggal

1. Dokumen ini diterbitkan sistem Sicantik Cloud berdasarkan data dari Penobohn, tersimpan dalam sistem Sicantik Cloud, yang menjadi tanggung jawab Penobohn  
 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI E-BISSN

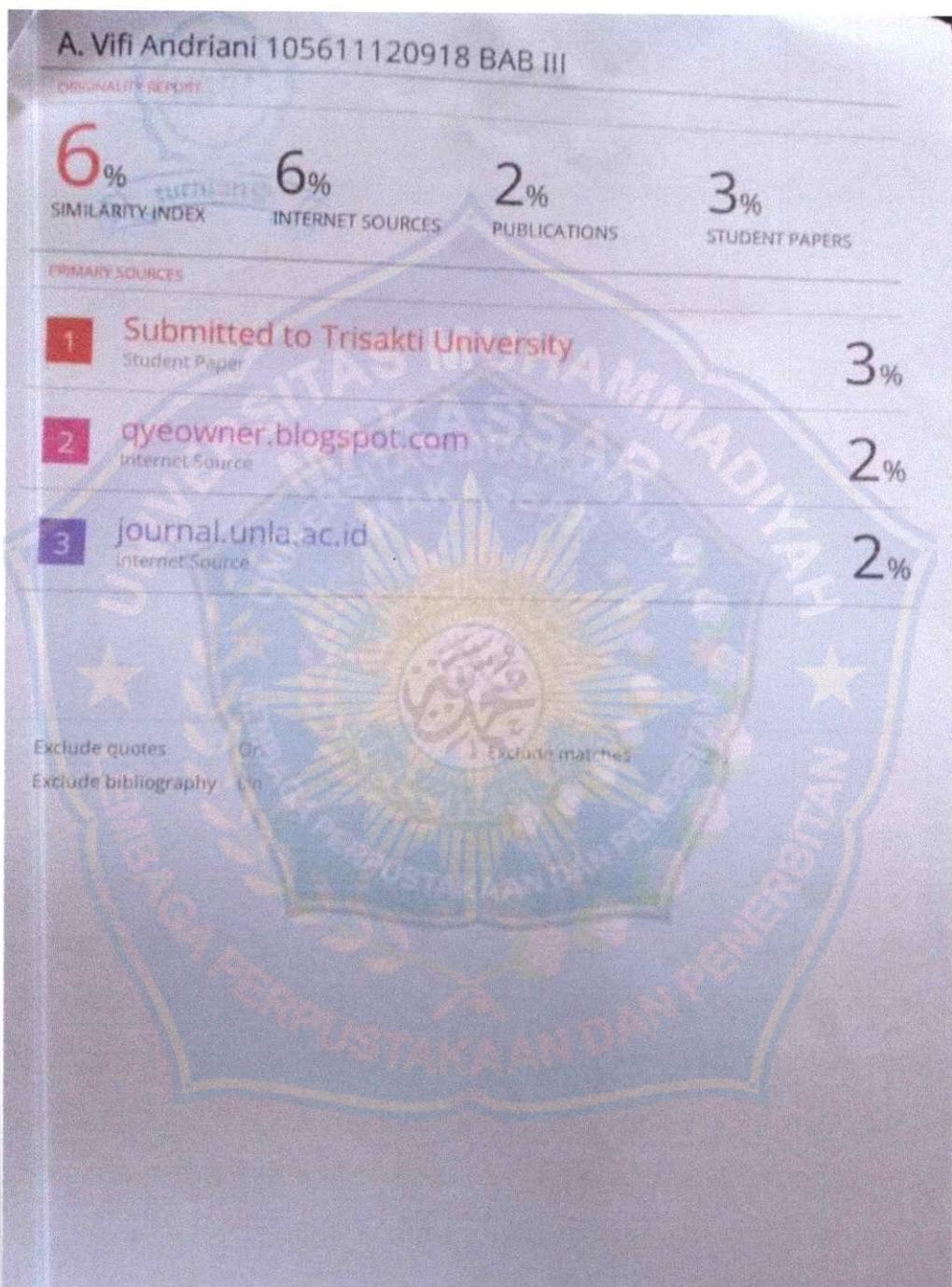


Bali  
Sertifikasi  
Elektronik

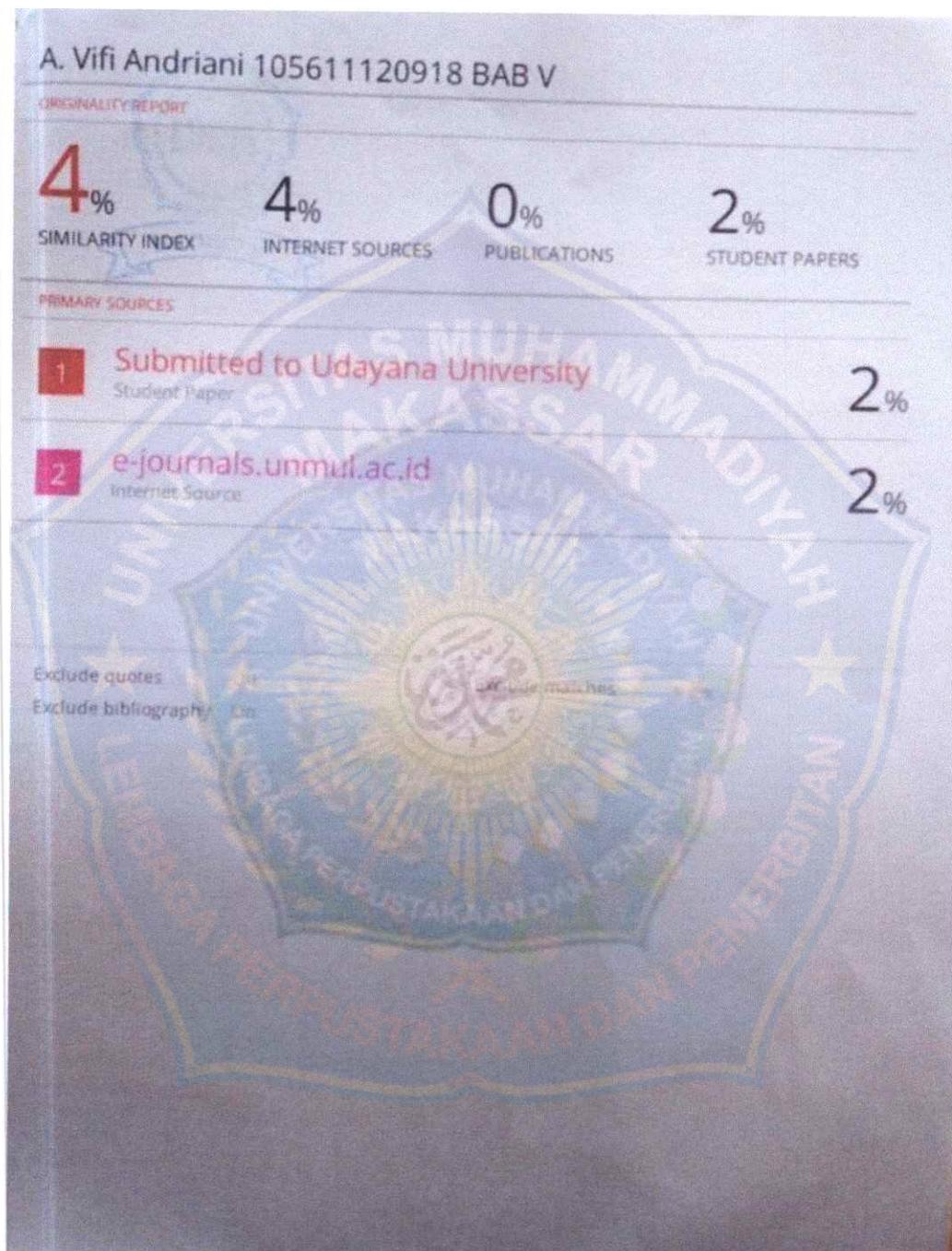












## RIWAYAT HIDUP



**A. Vifi Andriani**, Lahir pada tanggal 13 Maret 2000 Di Kafe Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Penulis lahir dari pasangan Andi Mappiasse dan Sumarni dan merupakan anak Bungsu dari 2 bersaudara. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari SD Inpres 3/77 Sanrego Pada Tahun 2006 dan selesai pada Tahun 2012.

Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Kahu pada Tahun 2015, dan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di SMAN 6 BONE pada Tahun 2018. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA pada Tahun yang sama penulis terdaftar sebagai salah satu Mahasiswi di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada Tahun 2022 penulis berhasil mendapatkan gelar S1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara dengan Judul " Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Guna Mengatasi Permasalahan Sampah Di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa. Penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan, pemerintah dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkhusus S1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar.